



GERMAS
Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

(R E N S T R A)

TAHUN 2018 - 2023

**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS KESEHATAN**

Jl. Raya Solo No. 32 Telp. (0351) 462728 Jiwan
MADIUN



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 60 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2018-2023 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 272 ayat (1) dan pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2023;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2011 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2008 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun diubah sebagai berikut:

Pasal I

1. Ketentuan ayat (3) pasal 2 dihapus sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dalam pencapaian Sasaran RPJMD ditetapkan program pembangunan daerah yang dituangkan pada BAB VI RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 merupakan program strategis daerah yang dilaksanakan Perangkat Daerah.
 - (2) Program pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah pada tingkat kebijakan.
 - (3) Dihapus.
2. Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) pada Pasal 3 dihapus sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 merupakan target kinerja pencapaian tujuan pada RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.
- (4) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
 - c. Inspektorat;
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- e. Dinas Kesehatan;
- f. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- g. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- h. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- i. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- j. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- k. Dinas Perhubungan;
- l. Dinas Pertanian dan Perikanan;
- m. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- n. Dinas Sosial;
- o. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
- p. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- q. Dinas Tenaga Kerja;
- r. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro;
- s. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan;
- t. Dinas Lingkungan Hidup;
- u. Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- v. Satuan Polisi Pamong Praja;
- w. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- x. Badan Kepegawaian Daerah;
- y. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- z. Badan Pendapatan Daerah;
- aa. RSUD Caruban;
- bb. RSUD Dolopo;
- cc. Badan Penganggulangan Bencana Daerah;
- dd. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- ee. Kecamatan Balerejo;
- ff. Kecamatan Dagangan;
- gg. Kecamatan Dolopo;
- hh. Kecamatan Geger;
- ii. Kecamatan Gemarang;

- jj. Kecamatan Jiwan;
- kk. Kecamatan Kebonsari;
- ll. Kecamatan Kare;
- mm. Kecamatan Madiun;
- nn. Kecamatan Mejayan;
- oo. Kecamatan Pilangkenceng;
- pp. Kecamatan Sawahan;
- qq. Kecamatan Saradan;
- rr. Kecamatan Wungu;
- ss. Kecamatan Wonoasri.

(5) Dihapus.

(6) Dihapus.

- 3 Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Ketentuan mengenai:

- a. Program pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2); dan
- b. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 27 Desember 2021

BUPATI MADIUN

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
Pada tanggal 27 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


ALIF MARGIANTO



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MADIUN
NOMOR : 188.4/ 8 . 1 / KPTS/402.102/2021
TENTANG

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MADIUN
TAHUN 2018-2023
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan setiap lembaga/ dinas untuk menyusun rencana strategis secara rinci sebagai acuan pembangunan dalam periode 5 (lima) tahun ;
 - b. bahwa sebagai dasar penyusunan rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun mengacu pada rencana strategis Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun serta peraturan lain yang berlaku;
 - c. bahwa pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Madiun.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Bupati Madiun Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Menugaskan tim sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama yaitu :

- a. Menyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023;

- b. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : MADIUN
Pada Tanggal : 04 JANUARI 2021

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MADIUN**


dr. SOELISTYO WIDYANTONO, MM

* Pembina Utama Muda
NIP. 196305131989111001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN
MADIUN

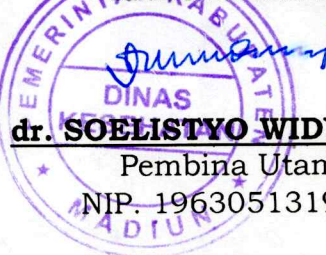
NOMOR : 188.4/ 8.1
/KPTS/402.102/2021

TANGGAL : 4 JANUARI 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MADIUN
TAHUN 2018-2023**

No.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN INDUK
1	Penanggung jawab	dr. SOELISTYO WIDYANTONO, MM	Kepala Dinas
2	Ketua	dr. AMAM SANTOSA, M.MKes.	Sekretaris Dinas Kesehatan
3	Sekretaris	SASANTI SARI W, ST, M.MKes.	Kasubag. Penyusunan Program dan Laporan
4	Anggota	1. dr.WIDYA WARDANI	Kabid. Pelayanan Kesehatan
		2. dr. ANIES DJAKA K.	Kabid. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
		3. TOMAS ADIWIBOWO, SKM.,M.MKes	Kabid Sumber Daya Kesehatan
		4. SUFIYANTO, SKM.,M.MKes.	Kabid Kesehatan Masyarakat
		5. SRI SUSANTI, SKM, M.MKes	Kasi Pelayanan Kesehatan Primer
		6. Dr. SOELAIMAN, S.KEP, NS.,M.Kes	Kepala Seksi Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
		7. PUJI SANTOSO. S.KM	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja Dan Olahraga
		8. AKHMAD YUNTA MUSTOFA, SKM	Kepala Seksi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Dan Kesehatan Jiwa

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MADIUN,**



dr. SOELISTYO WIDYANTONO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 196305131989111001

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 Kabupaten Madiun dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Kesehatan. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kesehatan. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Kesehatan dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023 dilakukan karena adanya Perubahan pada RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023. Perubahan tersebut sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Dinas Kesehatan.

Madiun, Agustus 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MADIUN



dr. SOELISTYO WIDYANTONO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 196305131989111001

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	i
BAB.1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah	8
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	10
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	12
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	38
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	41
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	41
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	42
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	55
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis	63
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	75
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	83
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	96

BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	137
BAB VIII	PENUTUP	156

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan non diskriminatif, serta norma-norma agama. Pada umumnya, pembangunan Nasional harus berwawasan kesehatan, yaitu setiap kebijakan public selalu memperhatikan dampaknya terhadap kesehatan.

Pembangunan Kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2005–2025. Kondisi pembangunan kesehatan diharapkan telah mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia seperti meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, kesetaraan gender, meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan public dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;

- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Sebagaimana ketentuan Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Perubahan RPJMD. Dengan demikian, tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah karena penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD.

Renstra Perangkat daerah berubah mendasar dan menindaklanjuti Perubahan RPJMD Kabupaten Madiun tahun 2021 sampai dengan 2023. Perubahan RPJMD secara legal formal diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan. Pada pasal 342 ayat 1 menjelaskan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila a) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan

tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini b) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini c) terjadi perubahan yang mendasar. Sedangkan pada pasal 342 ayat 2 dijelaskan dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD dan RPJMD sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila: a) sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun dan b) sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

Perubahan Renstra Dinas Kesehatan selain mendasar pada perubahan RPJMD Kabupaten Madiun 2021 - 2023 maka juga tetap mengacu pada Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 dan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024.

Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2023 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2021 - 2023.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021 - 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
- 6) Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 – 2024;
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 - 2023;

- 8) Peraturan Bupati Madiun Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Madiun, Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun
- 9) Peraturan Bupati Madiun Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Madiun
- 10) Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Madiun, Nomor 23 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun.

1.3 Maksud dan Tujuan

Pandemi Covid-19 di Indonesia dan wilayah Kabupaten Madiun pada khususnya, memerlukan penanganan yang tepat melalui berbagai program dan kebijakan yang dapat meminimalisir dampak wabah tersebut dari sisi kesehatan, ekonomi dan sosial.

Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021 - 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Kesehatan dalam penyusunan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2021, 2022, dan 2023.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021 - 2023 adalah sebagai berikut:

- g. Menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum terkait terjadinya pandemi covid 19 dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini;

- h. Menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019;
- i. Menjadi acuan dalam pembuatan rencana kerja Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II.

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun dan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

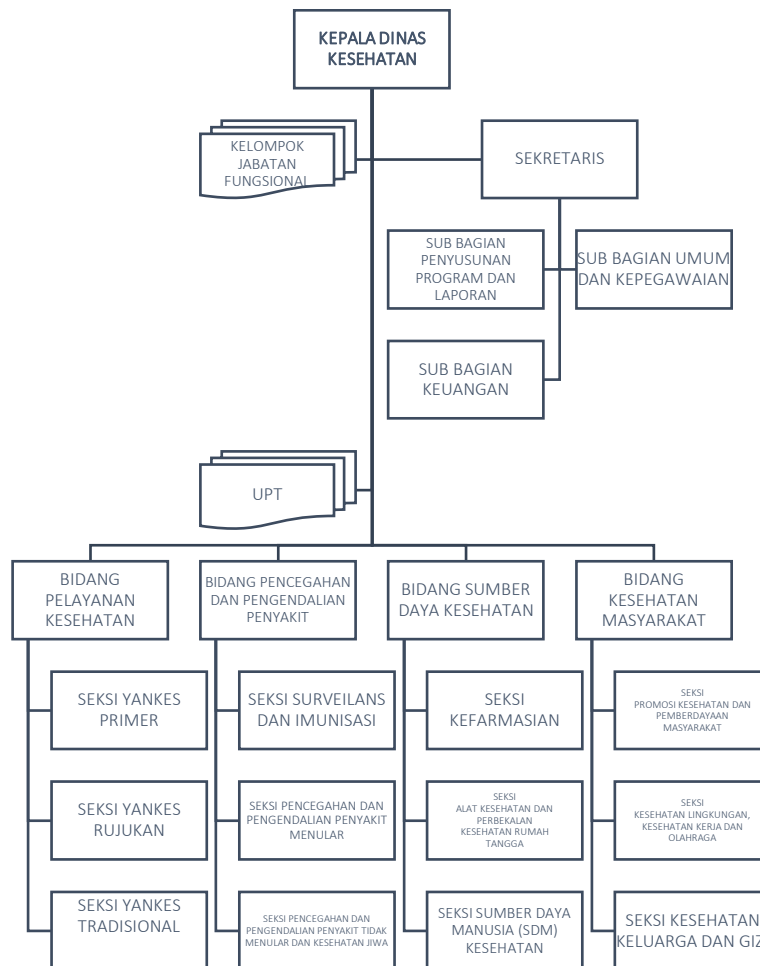
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesehatan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesehatan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kab. Madiun , Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun dipimpin oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang. Setiap Kepala Bidang membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi. Sedangkan Sekretaris dibantu 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, sebagaimana berikut ini :

1. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.

2. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi:
 - a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.
3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi:
 - a. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 - c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
4. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi:
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
 - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
 - c. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional.
5. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi:
 - a. Seksi Kefarmasian;
 - b. Seksi Alat Kesehatan dan PKRT; dan
 - c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan Bidang Pelayanan Kesehatan. Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan dan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya. UPT pada Dinas Kesehatan meliputi 26 Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas, 58 Puskesmas Pembantu dan 1 Instalasi Farmasi (IFK) Organisasi dengan tugas pokok dan fungsi yang ada diharapkan mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Pemerintah dan OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun

2.2. Sumber Daya Dinas Kesehatan

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu bentuk modal dasar bagi setiap organisasi baik swasta maupun pemerintahan. Sumber daya dapat berupa sumber daya manusia dan sumber daya asset/modal. Sumber daya manusia berkaitan dengan sekelompok orang yang berperan aktif dalam mencapai tujuan organisasi. Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Jumlah SDM di Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun dan UPT nya sampai tanggal 31 Desember pada tahun 2020, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.1 Jumlah SDM Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Berdasarkan Eselon

No	Jabatan	Jumlah
1	Struktural Eselon II	1
2	Struktural Eselon III	5
3	Struktural Eselon IV	16

Tabel 2.2 Jumlah tenaga kesehatan Kabupaten Madiun

No	Tenaga	Jumlah
1.	Dokter Spesialis	58
2.	Dokter Umum	102
3.	Dokter Gigi Spesialis	1
4.	Dokter Gigi	38
5.	Perawat	835
6.	Bidan	418
7.	Kesehatan Masyarakat	5
8.	Kesehatan Lingkungan	11
9.	Gizi	49
10.	Laboratorium Medik	57
11.	Teknik biomedik lainnya	7
12.	Keterampilan Fisik	23
13.	Ketehnisian Medis	9
14.	Ketehnisian Farmasi	91
15.	Apoteker	24
16.	Dukungan Manajemen	425

2.2.2 Sarana dan Prasarana Kesehatan

Tabel 2.3 Jumlah sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten

No	Jenis Sarana	Jumlah
1.	Rumah Sakit Umum	3
2.	puskesmas rawat inap	10
3.	puskesmas non rawat inap	16
4.	puskesmas pembantu	58
5.	Klinik Pratama	10
6.	Klinik Utama	2
7.	Praktik Pengobatan Tradisional	561
8.	Bank Darah Rumah Sakit	2
9.	Unit Transfusi Darah	1
10.	Pedagang Besar Farmasi	3
11.	Apotek	79
12.	Apotek PRB	2
13.	Toko Obat	5

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Dalam mengukur kinerja pelayanan, Dinas Kesehatan menjelaskan dalam dua indikator yaitu capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu capaian indikator *impact* dan capaian Indikator Kinerja yaitu capaian indikator *outcome* dari upaya pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun dan jajaran kesehatan diseluruh Kabupaten Madiun. Capaian tersebut yang dilaporkan Kepala Dinas Kesehatan kepada Bupati dan masyarakat.

Skala penilaian pengukuran capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Tahun 2020 dikelompokkan sebagai berikut :

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 100%	Tercapai Target	
2	< 100%	Tidak Tercapai Target	

Berikut hasil capaian indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Tahun 2020 :

Tabel 2.4 Capaian Indikator Outcome Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Tahun 2020

NO	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA
1.	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 LH	0	173,39
2.	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 LH	0	7,28
3.	Prevalensi Balita stunting	%	20	16,98
4.	Persentase pelayanan penderita penyakit menular dan tidak menular sesuai standar	%	100	100

NO	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA
5.	Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) di desa/kelurahan yang ditanggulangi < 24 jam	%	100	100
6.	Persentase pembangunan gedung puskesmas dan puskesmas pembantu	%	100	100
7.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	%	100	100
8.	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	%	100	100
9.	Persentase produk alkes dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat	%	100	100
10.	Persentase puskesmas yang memberikan pelayanan JKN sesuai standar	%	100	100
11.	Prosentase Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas	%	100	100
12.	Cakupan masyarakat umum yang mendapat pelayanan kesehatan	%	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Tahun 2020

A. Analisa Capaian Kinerja

Hasil pengukuran kinerja tersebut diatas kemudian dilakukan analisa pada setiap sasaran strategis untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat terhadap kinerja yang diharapkan.

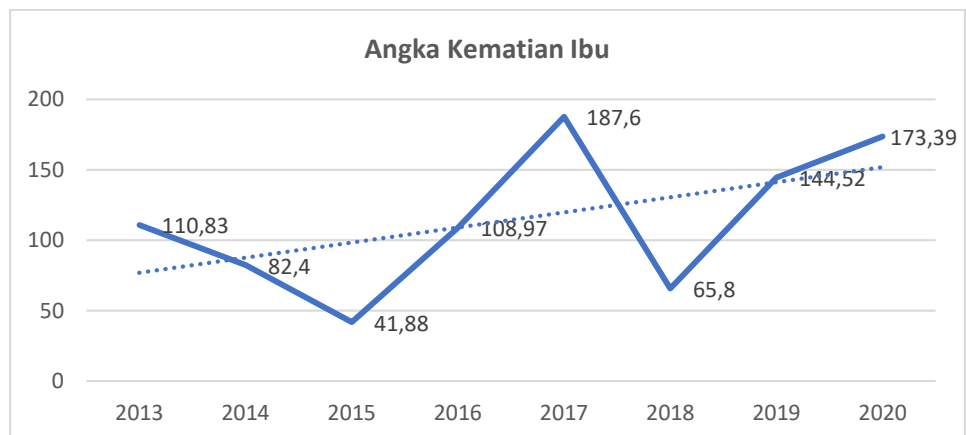
1. Angka Kematian Ibu per 100.000 LH

Potensi dan permasalahan pembangunan kesehatan menjadi masukan dalam menentukan arah kebijakan dan strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun. Saat ini akses ibu hamil, bersalin dan nifas terhadap pelayanan kesehatan sudah cukup baik, akan tetapi Angka Kematian Ibu (AKI) masih cukup tinggi. Kondisi tersebut

kemungkinan disebabkan antara lain karena kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil dan bersalin belum memadai, kondisi ibu hamil yang tidak sehat serta faktor determinan lainnya.

Kematian ibu pada Tahun 2020 sebanyak 15 kasus atau AKI sebesar 173,39 per 100.000 Lahir Hidup, dimana capaian tersebut naik bila dibandingkan dengan Tahun 2019 yaitu sebesar 13 kasus atau AKI sebesar 144,52 per 100.000 Lahir Hidup. AKI Tahun 2020 ini belum mencapai target yaitu tidak ada kematian ibu di wilayah Kabupaten Madiun Capaian AKI Tahun 2013-2020 disajikan pada gambar berikut ini.

Gambar 2.2 Capaian AKI Kabupaten Madiun dibandingkan Target RPJMD Tahun 2013-2020



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun 2020

Gambar diatas menunjukkan capaian AKI per tahun mengalami fluktuasi. Seluruh kasus kematian ibu telah dilakukan Audit Maternal Perinatal (AMP) yang dilaksanakan untuk mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan riwayat dan kondisi sejak masa kehamilan, penatalaksanaan persalinan dan kronologis kasus sampai terjadinya kematian.

Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai upaya untuk menurunkan AKI pada Tahun 2020 antara lain adalah :

1. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas bidan koordinator puskesmas, Peningkatan keterampilan kelas ibu bagi bidan puskesmas dan Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan pada puskesmas PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar);
2. Peningkatan pelayanan kesehatan melalui kegiatan Kajian Audit Maternal Perinatal (AMP), Pembinaan Puskesmas PONED dan Non PONED serta Skrining Hipotiroid Kongenital;
3. Pelaksanaan Jaminan Persalinan (Jampersal).
4. Melaksanakan Ante Natal Care (ANC) Terpadu secara adekuat.
5. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan Puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Esensial Dasar (PONED)
6. Meningkatkan Persalinan di fasilitas kesehatan
7. Penguatan sistem rujukan antara Puskesmas, Klinik dan rumah sakit.

Pelaksanaan kegiatan tersebut diatas sebagian besar dilakukan secara daring dikarenakan terjadinya pandemic covid 19 yang menyebabkan semua kegiatan terfokus pada penanganan dan penanggulangan covid 19 dengan tidak meninggalkan pelayanan kesehatan yang lainnya sehingga semua pelayanan tetap beriring sejalan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya menurunkan AKI serta solusi yang akan dilaksanakan sebagai bahan perencanaan program di tahun yang akan datang adalah sebagai berikut :

❖ Permasalahan

- a. Terjadinya pandemic covid 19 menyebabkan semua kegiatan pelayanan menjadi kurang optimal. Terutama kegiatan yang melibatkan banyak orang untuk berkumpul.
- b. Akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu mulai dari masa kehamilan, bersalin sampai dengan nifas belum optimal karena pandemic covid 19 dan masih perlu ditingkatkan;
- c. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu dan kesehatan reproduksi masih relatif kurang;
- d. Kompetensi petugas dalam pemantauan pasca persalinan belum optimal;
- e. Keterlibatan fasilitas pelayanan kesehatan swasta dalam hal peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan keluarga belum optimal.

❖ Solusi

- a. Kegiatan yang melibatkan banyak orang untuk berkumpul dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat.
- b. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu melalui kegiatan implementasi Antenatal Care (ANC) terpadu, penatalaksanaan dan rujukan kasus komplikasi kehamilan serta jejaring dengan Bidan Praktek Swasta (BPS) tetap dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat;

- c. Peningkatan sistem alur rujukan pada puskesmas PONED dan rumah sakit PONEK dalam upaya penanganan kegawatdaruratan maternal neonatal;
- d. Pemantauan pasca persalinan oleh petugas melalui penguatan peran bidan desa dan monitoring evaluasi kegiatan Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat;
- e. Peningkatan pengetahuan ibu tentang tanda bahaya kehamilan melalui kegiatan kunjungan rumah dan pendampingan ibu hamil resiko tinggi;
- f. Dilakukan Intervensi gizi pada ibu hamil Kurang Energi Kalori (KEK) dan ibu hamil anemia sebagai upaya perbaikan gizi pada ibu hamil;
- g. Peningkatan peran serta masyarakat dalam mendampingi ibu hamil melalui protokol kesehatan yang ketat.

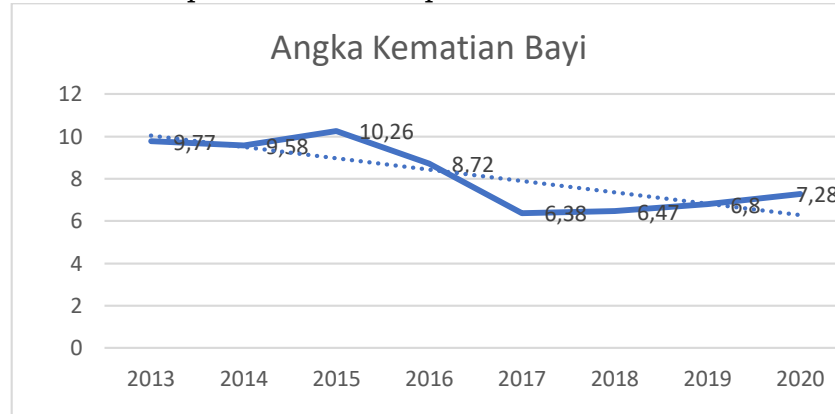
2. Angka Kematian Bayi per 1.000 LH

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator status kesehatan masyarakat yang terkait dengan berbagai indikator kesehatan dan indikator pembangunan lainnya. AKB sangat sensitif terhadap ketersediaan, pemanfaatan dan kualitas pelayanan maupun perawatan antenatal dan post-natal. AKB dipengaruhi oleh indikator-indikator morbiditas (kesakitan) dan status gizi anak serta Ibu pada masa kehamilan. Disamping itu, AKB juga berhubungan dengan angka pendapatan daerah per-kapita, pendapatan keluarga, jumlah anggota keluarga, pendidikan ibu dan keadaan gizi keluarga.

Kematian bayi pada Tahun 2020 terjadi sebanyak 63 kasus atau AKB sebesar 7,28 per 1.000 Lahir Hidup, dimana capaian tersebut sedikit meningkat bila

dibandingkan dengan Tahun 2019 yaitu sebesar 15 kasus atau AKB sebesar 6,8 per 1.000 Lahir Hidup. Capaian AKB Tahun 2013-2020 disajikan pada gambar berikut ini.

Gambar 2.3 Capaian AKB Kabupaten Madiun Tahun 2013-2020



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun 2020

Gambar diatas menunjukkan capaian AKB setiap tahun cenderung mengalami penurunan. Seluruh kasus kematian bayi telah dilakukan Audit Maternal Perinatal (AMP) yang dilaksanakan untuk mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan penyebab kematian bayi.

Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun telah melakukan berbagai upaya dalam rangka menurunkan AKB pada Tahun 2020 meskipun dalam pelaksanaannya terkendala dengan adanya pandemic covid 19 antara lain :

1. Kerjasama lintas program berupa kegiatan pencegahan penyakit melalui pemberian imunisasi dasar pada bayi;
2. Pencegahan dan Penanggulangan anemi pada remaja dan ibu hamil dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat
3. Peningkatan upaya rujukan dini dan terencana
4. Pelaksanaan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM) di

pelayanan dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat.

5. Peningkatan rujukan yang tepat dan cepat untuk kasus gawat darurat neonatal ke RS Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) agar dicapai rujukan berbasis kompetensi

Upaya penurunan AKB di Kabupaten Madiun tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dan solusi sebagai langkah tindak lanjut dalam menekan kasus kematian pada bayi. Adapun permasalahan dan solusi dalam penurunan AKB adalah sebagai berikut :

❖ Permasalahan

- a. Terjadinya pandemic covid 19 menyebabkan semua kegiatan pelayanan menjadi kurang optimal. Terutama kegiatan yang melibatkan banyak orang untuk berkumpul
- b. Kasus kematian bayi di Kabupaten Madiun Tahun 2019 disebabkan antara lain :
 - Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)
 - Asfiksia yaitu kondisi saat bayi kekurangan oksigen sebelum atau selama kelahiran. Hal ini ditandai dengan kulit bayi yang membiru, sesak napas, detak jantung menurun, dan lemah otot.
 - Kelainan bawaan
 - Infeksi berupa sepsis
 - Penyebab lain-lain yang meliputi lahir prematur, aspirasi, anemia, febris, meningitis, bronkopneumonia, dan kelainan kongenital
- c. Pemberian ASI eksklusif yang belum optimal disebabkan masih adanya bayi baru lahir yang diberi susu formula;

- d. Masih adanya ibu hamil KEK dan anemia yang berpengaruh terhadap kesehatan pada masa kehamilan;
- e. Kapasitas petugas dalam skrining bayi berisiko belum optimal karena terkendala dengan pandemic covid 19.

❖ Solusi

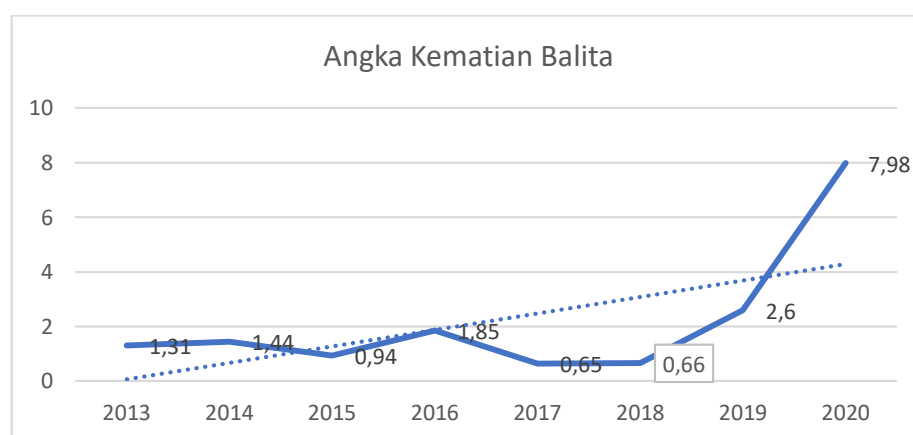
- a. Semua kegiatan baik pelayanan maupun penyuluhan di masyarakat dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat
- b. Guna mencegah terjadinya kasus kematian bayi BBLR ibu wajib menjaga pola makan saat hamil dengan memperbanyak makan sayur dan buah, makanan tinggi serat dan asam folat serta jenis makanan sehat lainnya. Semakin terpenuhi kebutuhan gizi ibu saat hamil, maka kesehatan ibu dan bayi pun akan semakin optimal sehingga bayi akan lahir dengan berat badan normal;
- c. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil KEK dan anemia untuk mencegah bayi lahir dengan kelainan kongenital, asfiksia, infeksi maupun kelainan bawaan;
- d. Pendampingan ibu oleh kader kesehatan dan petugas kesehatan dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dalam pola asuh bayi dalam rangka mendorong ibu untuk memberikan ASI Eksklusif ;
- e. Peningkatan kapasitas petugas dalam skrining bayi berisiko melalui kegiatan pelatihan baik yang bersifat daring maupun luring.

3. Angka Kematian Anak Balita per 1.000 LH

Angka Kematian Anak Balita (AKABA) adalah jumlah kematian Anak umur 12-59 bulan per 1.000 kelahiran hidup. AKABA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor - faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi, penyakit infeksi dan kecelakaan.

Capaian AKABA Tahun 2020 adalah sebesar 7,98 per 1.000 LH, dimana capaian tersebut belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 1,07 per 1.000 LH. AKABA Tahun 2020 sedikit mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan AKABA Tahun 2019 yaitu sebesar 2,6 per 1.000 LH. Capaian AKABA Tahun 2013-2020 disajikan pada gambar berikut ini.

Gambar 2.4 Capaian AKABA Kabupaten Madiun Tahun 2013-2019



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun 2020

Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa capaian AKB setiap tahun cenderung fluktuatif dimana Dinas Kesehatan telah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan AKABA di masa pandemic covid 19 diantaranya adalah :

1. Peningkatan Kompetensi Pelayanan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan Manajemen Terpadu

Bayi Muda (MTBM) bagi bidan puskesmas dan bidan desa baik dilakukan melalui daring maupun luring dengan protocol kesehatan yang ketat;

2. Pelayanan kesehatan bagi anak balita termasuk pemberian imunisasi dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dengan protocol kesehatan yang ketat.

Penurunan AKABA Tahun 2020 di Kabupaten Madiun tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi selama berlangsungnya pandemic covid 19 sehingga diperlukan solusi untuk mengatasinya antara lain yaitu :

❖ Permasalahan

- a. Pemantauan tumbuh kembang balita oleh keluarga dan petugas kesehatan belum dilaksanakan secara optimal dikarenakan pandemi covid 19 .

❖ Solusi

- a. Semua kegiatan baik pelayanan maupun penyuluhan di masyarakat dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat
- b. Pemantauan kesehatan balita oleh petugas kesehatan yang dilaksanakan di posyandu maupun di puskesmas meliputi penimbangan, pemberian makanan tambahan, pemberian vitamin, imunisasi dan pemeriksaan kesehatan dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat;
- c. Peningkatan kompetensi Pelayanan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) bagi bidan puskesmas, bidan desa dan dokter puskesmas yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas kesehatan dalam tatalaksana kasus balita

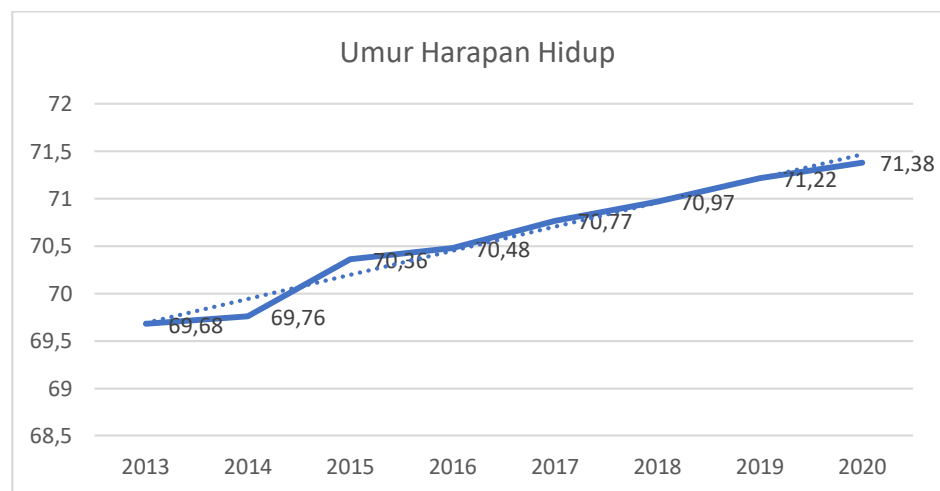
sakit baik secara daring ataupun luring dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat.

4. Angka Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) atau Angka Harapan Hidup (AHH) sesungguhnya merefleksikan upaya dalam menangani berbagai aspek pembangunan kesehatan, termasuk aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, pemberantasan berbagai penyakit yang berpengaruh terhadap usia harapan hidup serta edukasi masyarakat tentang pencegahan penyakit dan penerapan paradigma sehat.

AHH Kabupaten Madiun Tahun 2013-2020 ditampilkan pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.5 Capaian UHH Kabupaten Madiun Tahun 2013-2020



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun 2020

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa selama beberapa tahun AHH di Kabupaten Madiun mengalami peningkatan. AHH berkaitan erat dengan kesehatan dan kesejahteraan penduduk lanjut usia (Lansia). Pemeliharaan kesehatan lansia perlu diutamakan agar lansia tetap hidup sehat dan produktif secara sosial maupun ekonomi.

5. Prevalensi Balita Stunting

Prevalensi balita stunting pada tahun 2020 sebesar 16,98 % telah mencapai target yaitu sebesar 20,3%. Kondisi balita yang termasuk kategori stunting adalah pendek dan sangat pendek. Balita yang mengalami stunting masih bisa beraktifitas normal, namun dikawatirkan bila berlanjut akan mengganggu pertumbuhan intelegensianya. Prevalensi ini harus terus diturunkan agar pada masa yang akan datang kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Madiun terus meningkat. Penurunan prevalensi stunting ini juga merupakan prioritas nasional bidang kesehatan.

Berbagai upaya yang dilakukan untuk penurunan stunting pada tahun 2020 antara lain :

- Melakukan pencegahan anemia pada remaja dengan sosialisasi tentang pentingnya minum tablet tambah darah dan minum tablet tambah darah.
- Peningkatan kapasitas petugas dalam pencegahan dan penanganan anemia pada remaja dan ibu hamil yang dilakukan baik secara daring maupun luring dengan protocol kesehatan yang ketat
- Pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil
- Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada ibu hamil yang kekurangan energi protein (KEK)
- Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada Balita
- Pemberdayaan taman posyandu

Capaian Indikator Kinerja Sasaran “**Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan kemandirian masyarakat di bidang kesehatan**” adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dan Kemandirian Masyarakat Di Bidang Kesehatan

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Target Akhir RENSTRA (2019)
			Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Cakupan Rumah Tangga ber-PHBS (%)	52,98	50	55,94%	111,88	65,48

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun 2020

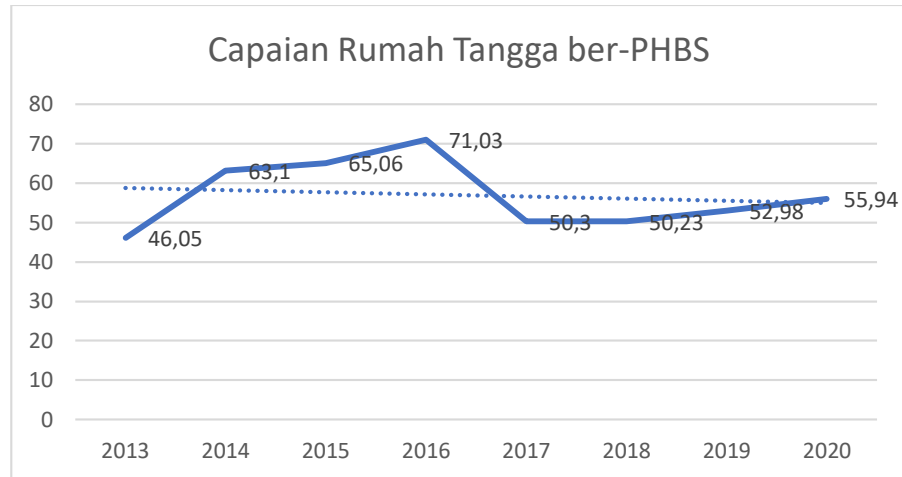
6. Cakupan Rumah Tangga ber-PHBS (%)

Salah satu penanggulangan wabah covid 19 yang disarankan adalah melakukan PHBS. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di rumah tangga merupakan upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau, dan mampu melaksanakan PHBS serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Manfaat PHBS yang diperoleh masyarakat adalah mampu mengupayakan lingkungan sehat, mencegah dan menanggulangi masalah-masalah kesehatan, masyarakat dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada serta masyarakat mampu mengembangkan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), terutama untuk menanggulangi wabah covid 19.

Cakupan Rumah Tangga ber-PHBS pada Tahun 2020 adalah sebesar 55,94%, dimana capaian tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan sebesar 50%. Capaian Tahun 2020 tersebut naik jika dibandingkan dengan Tahun 2019 yaitu sebesar 52,98%. Capaian Rumah

Tangga ber-PHBS Tahun 2013-2020 ditampilkan pada grafik berikut ini.

Gambar 2.6 Capaian Rumah Tangga ber-PHBS Kabupaten Madiun Tahun 2013-2020



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun 2020

❖ Permasalahan :

- a. Selama terjadi pandemic covid 19 penyuluhan kepada masyarakat hanya bisa dilakukan melalui media.
- b. Masih adanya rumah tangga yang belum memenuhi 10 tatanan PHBS khususnya tidak merokok di dalam rumah;
- c. Pemberdayaan masyarakat dalam mendukung PHBS masih belum optimal;
- d. Masih adanya sarana dan prasarana promosi kesehatan yang belum terpenuhi.

❖ Solusi :

- a. Memperbanyak penyuluhan dengan berbagai media terutama terkait covid 19.
- b. Pemberdayaan masyarakat melalui UKBM yang bertujuan agar masyarakat mampu mengatasi masalah kesehatan mereka secara mandiri serta mencakup kemampuan untuk

memelihara dan melindungi diri maupun masyarakat dari ancaman kesehatan;

- c. Penyebaran informasi melalui berbagai media dalam dan luar ruangan.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran “**Meningkatnya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku**” adalah ebagai berikut :

Tabel 2.7 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku

No .	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Target Akhir RENSTRA (2019)
			Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Persentase sarana kesehatan memenuhi standar (%)	100	93	100	107,53	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun 2020

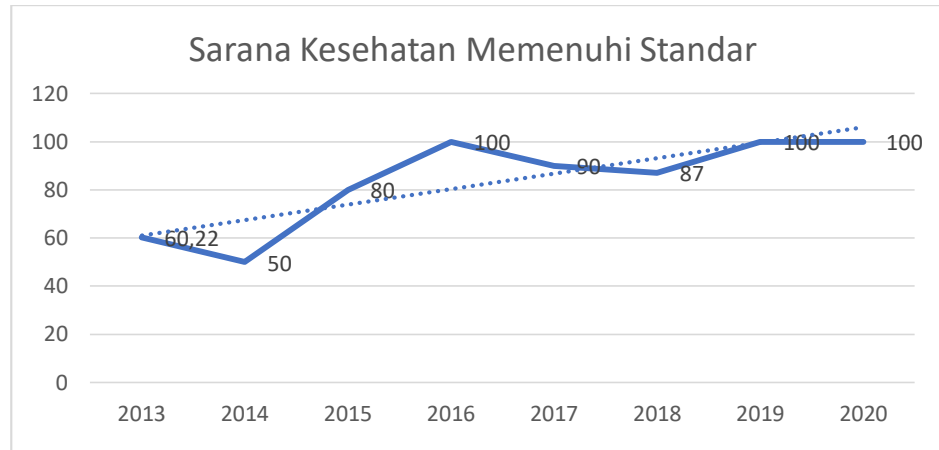
7. Persentase sarana kesehatan memenuhi standar (%)

Arah pembangunan kesehatan salah satunya adalah meningkatkan mutu, jangkauan dan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dalam upaya mencapai tujuan tersebut maka penyediaan sarana/fasilitas pelayanan kesehatan sangat penting artinya. Sarana kesehatan merupakan tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang meliputi balai pengobatan, puskesmas, rumah sakit, praktek dokter, bidan praktek, apotek, laboratorium dan sarana kesehatan lainnya.

Persentase sarana kesehatan memenuhi standar Tahun 2020 sebesar 100%, dimana capaian tersebut memenuhi target yang ditetapkan sebesar 100%. Capaian

Tahun 2020 tersebut sama jika dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar 100%. Perkembangan sarana kesehatan yang memenuhi standar Tahun 2013-2019 dijabarkan pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.8 Capaian Sarana Kesehatan Memenuhi Standar Tahun 2013-2020



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun 2020

❖ Permasalahan :

- a. Permasalahan administratif yang belum dapat dipenuhi oleh pemohon yang dapat menghambat pengajuan/ perpanjangan ijin sarana kesehatan.

❖ Solusi :

- a. Pembinaan sarana kesehatan tentang pengurusan dan perijinan baik sarana kesehatan swasta maupun milik pemerintah.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran “**Meningkatnya upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit serta mewujudkan mutu lingkungan hidup yang lebih sehat**” adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Serta Mewujudkan Mutu Lingkungan Hidup Yang Lebih Sehat

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Target Akhir RENSTRA (2019)
			Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)	89,1	95	83,01	87.38	95
2.	Cakupan Penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA positif (%)	83	73	25,15	34,45	73

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun 2020

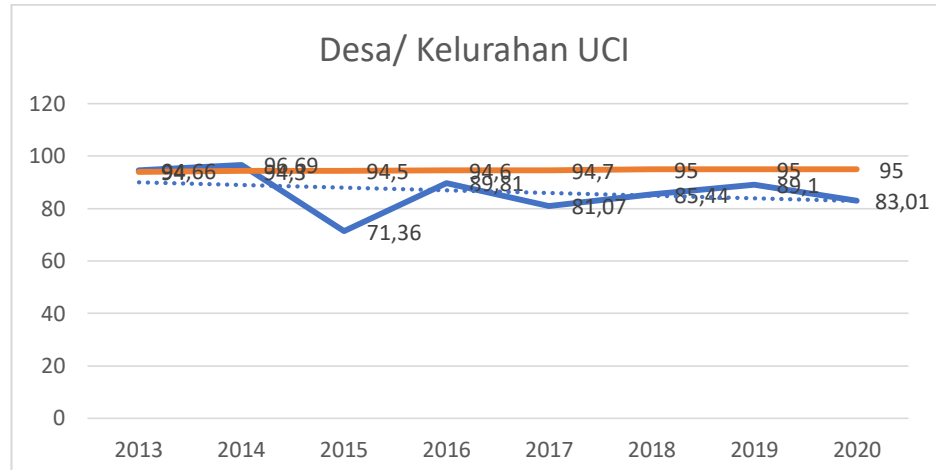
8. Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)

Guna mencegah timbulnya penyakit menular di masyarakat, cakupan imunisasi harus dipertahankan dan merata di seluruh wilayah. Sebab dengan imunisasi maka akan menambah kekebalan daya tahan tubuh, sehingga dapat mencegah timbulnya Kejadian Luar Biasa yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (KLB PD3I).

Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Tahun 2020 adalah 83,01% dimana capaian tersebut tidak memenuhi target yang diharapkan yaitu 95%. Capaian Tahun 2020 tersebut turun jika

dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar 89,1%. Capaian Desa/ Kelurahan UCI di Kabupaten Madiun Tahun 2013-2020 disajikan pada grafik dibawah ini.

Gambar 2.8 Capaian *Desa/ Kelurahan UCI* Tahun 2013-2020



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun 2020

Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa mulai Tahun 2013-2020 tahun Capaian Desa/ Kelurahan UCI tidak mencapai target yang diharapkan. Berikut permasalahan yang dihadapi serta solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

❖ Permasalahan :

- a. Sehubungan dengan adanya pandemic covid 19 maka kegiatan pelayanan yang bersifat mengumpulkan massa mengalami kendala dan harus menggunakan protocol kesehatan yang ketat.
- b. Masih adanya salah satu imunisasi dengan antigen yang belum mencapai target yaitu untuk imunisasi HB0 yang harus diberikan pada bayi baru lahir <24 Jam, hal ini menyebabkan imunisasi dasar lengkap tidak memenuhi target yang diharapkan;
- c. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program imunisasi masih belum dilaksanakan sepenuhnya.

❖ Solusi :

- a. Pelaksanaan pelayanan imunisasi dilakukan dengan menggunakan protocol kesehatan yang ketat.
- b. Pelaksanaan sweeping (pendataan ulang sasaran yang belum tervaksinasi), DOFU (Drop Out Follow Up) melalui kegiatan pemantauan kepada sasaran yang belum memenuhi imunisasi dasar;
- c. Supervisi dan monitoring kegiatan imunisasi di 26 puskesmas dan pelaksanaan BIAS di sekolah untuk mengetahui penatalaksanaan program imunisasi;
- d. Validasi data yang bertujuan untuk meningkatkan cakupan imunisasi baik imunisasi dasar, imunisasi lanjutan maupun UCI serta penatalaksanaan kegiatan imunisasi.

9. Cakupan Penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA positif (%)

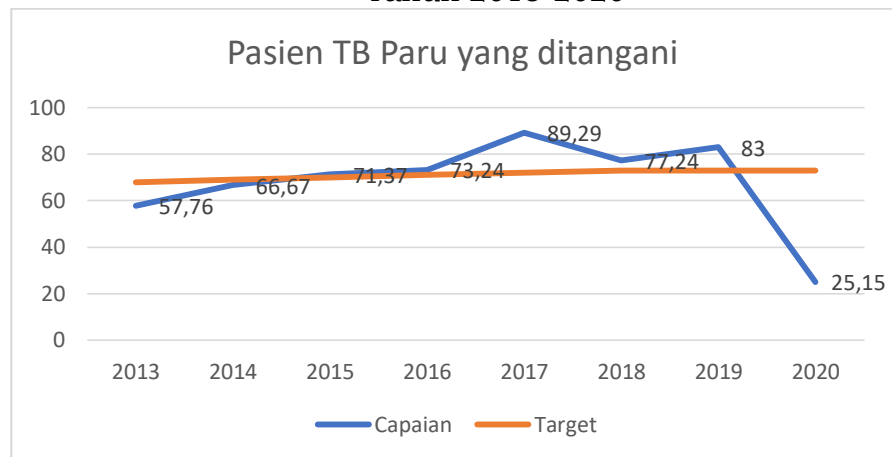
Tuberkulosis (TB) adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis* yang dapat menyerang berbagai organ terutama paru-paru. TB bila tidak diobati atau pengobatannya tidak tuntas dapat menimbulkan resistensi, komplikasi berbahaya hingga kematian.

Beberapa indikator yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pengendalian TB terutama adalah indikator penemuan kasus, indikator pengobatan dan angka keberhasilan pengobatan TB.

Cakupan Penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA positif Tahun 2020 adalah 25,15%, dimana capaian tersebut belum memenuhi target yang diharapkan sebesar 73%. Capaian tersebut menurun jika dibandingkan Tahun 2019 sebesar 83%. Berikut capaian Penemuan dan

penanganan pasien baru TB BTA positif .

Gambar 2.9 Penemuan dan Penanganan Pasien TB Paru Tahun 2013-2020



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun 2020

Keberhasilan pencapaian indikator tersebut dipengaruhi oleh keteraturan dan ketaatan penderita untuk berobat sampai dengan waktu pengobatan yang telah ditentukan. Peran petugas kesehatan dan Pengawas Menelan Obat (PMO) dalam mendampingi dan memberikan motivasi kepada pasien juga menjadi faktor pendukung keberhasilan penurunan kasus TB BTA positif.

❖ Permasalahan :

- a. Selama terjadinya pandemi covid 19 kunjungan pasien ke pelayanan kesehatan menurun sehingga pengawasan dan penemuan penderita TBC juga menurun drastis
- b. Faktor pasien yang tidak patuh minum Obat Anti TB (OAT) sering terjadi dan merupakan penyebab utama gagalnya pengobatan dan relaps. Ketidapatuhan pada pengobatan juga dapat berakibat pada timbulnya resistensi sehingga memerlukan pengobatan yang lebih lama. Pengobatan yang tidak selesai akan

berakibat kuman TB resisten terhadap obat-obatan TB (Multi Drug Resisten);

- c. Kurangnya peran serta dan dukungan keluarga untuk memberikan motivasi agar patuh minum obat TB.

❖ Solusi :

- a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang penyakit TBC baik melalui kunjungan pasif maupun aktif dengan tetap memperhatikan protocol kesehatan.
- b. Meningkatkan jumlah penderita TB yang menjalani proses penegakan diagnosa dan pasien TB yang berobat di fasilitas pelayanan kesehatan dengan dukungan PMO;
- c. Memperkuat kapasitas pelayanan kesehatan dan petugas kesehatan dalam mempromosikan Directly Observed Treatment Shortcourse (DOTS) serta pelayanan dengan menggunakan pendekatan yang berfokus pada pasien;
- d. Pengembangan DOTS berbasis masyarakat sebagai upaya mengurangi keterlambatan penegakan diagnosa, meningkatkan dukungan kepada PMO termasuk keluarga dan pasien yang sedang menjalani pengobatan.

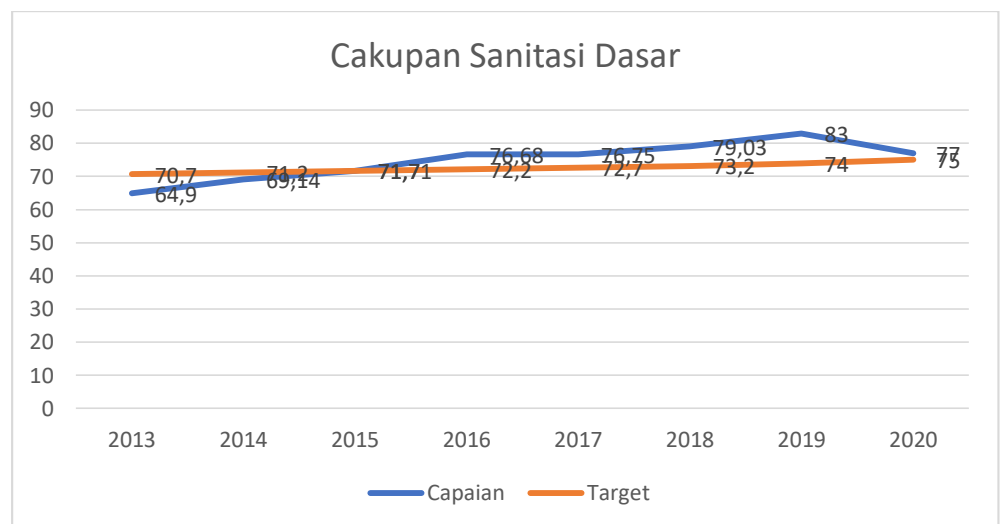
10. Cakupan rumah yang memenuhi sanitasi dasar (%)

Sanitasi dasar merupakan sanitasi minimum yang diperlukan untuk menyediakan lingkungan yang sehat dan memenuhi syarat kesehatan serta menitikberatkan pada pengawasan berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Upaya sanitasi dasar meliputi penyediaan air bersih, ketersediaan

jamban dan pembuangan air limbah.

Cakupan rumah yang memenuhi sanitasi dasar Tahun 2020 adalah sebesar 77%, dimana capaian tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan sebesar 75%. Jika dibandingkan capaian Tahun 2018 sebesar 83% maka capaian tersebut telah mengalami penurunan. Berikut ini perkembangan Cakupan Rumah Yang Memenuhi Sanitasi Dasar Tahun 2013-2020.

Gambar 2.10 Cakupan Rumah Yang Memenuhi Sanitasi Dasar dibandingkan Target RPJMD Tahun 2013-2020



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun 2020.

❖ Permasalahan :

- a. Akses dan kualitas pengelolaan sanitasi yang belum optimal, dimana akses masyarakat terhadap fasilitas sanitasi yang layak cukup tinggi namun tingkat aksesibilitas ini tidak memperhitungkan kepemilikan atau tingkat penggunaan jamban;
- b. Pengelolaan sanitasi belum dilengkapi dengan kebijakan dan pengaturan soal organisasi dan tata kerja institusi atau lembaga yang bertugas mengelola prasarana dan sarana yang ada;

- c. Sanitasi juga masih menjadi masalah terutama di daerah pedesaan yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat.
- ❖ Solusi :
- a. Optimalisasi kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dimana masyarakat diajak memahami mengenai pentingnya sanitasi dasar;
 - b. Perbaikan sanitasi dasar merupakan program pencegahan terhadap timbulnya berbagai penyakit dengan memprioritaskan upaya preventif dan promotif;
 - c. Agar dapat memberikan hasil yang maksimal, program perbaikan sanitasi dasar tidak dapat dilaksanakan hanya dalam satu tempat saja tetapi terintegrasi dan menyeluruh;
 - d. Pembangunan sanitasi dasar membutuhkan komitmen dari setiap lintas sektor dan lintas program. Masalah sanitasi dasar tidak hanya milik sektor kesehatan saja, tetapi sektor lainnya pun ikut andil tanggung jawab dalam penanggulangnya. Selain itu juga, pihak swasta mempunyai peranan yang penting untuk terus dirangkul bersama membangun perbaikan kualitas sanitasi dasar melalui kegiatan *Community Social Responsibility* (CSR).

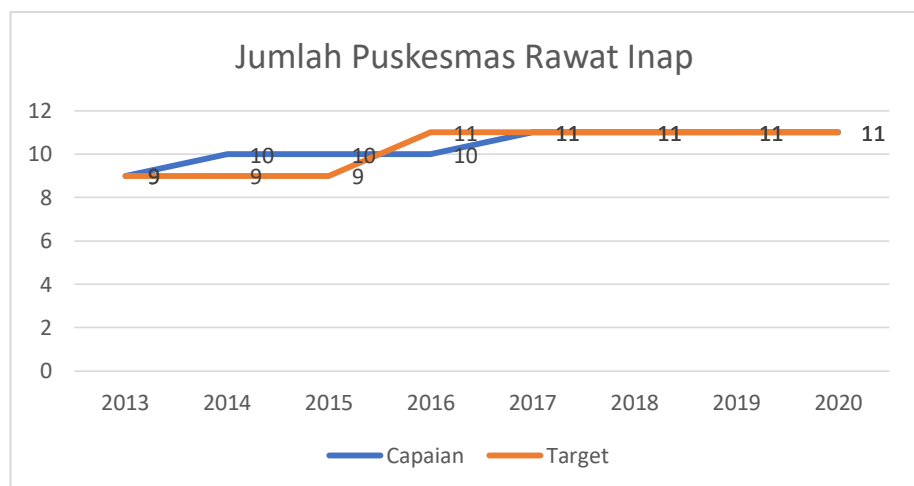
Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan khusus dapat digambarkan dengan besaran puskesmas yang melayani rawat inap guna mendekatkan pelayanan sebagai berikut :

1. Jumlah puskesmas rawat inap

Jumlah puskesmas rawat inap di Kabupaten Madiun pada tahun 2020 sebanyak 11 puskesmas, dimana capaian tersebut telah memenuhi target yang ingin dicapai sebanyak 11 puskesmas.

Puskesmas perawatan (rawat inap) berfungsi sebagai pusat rujukan pasien yang gawat darurat sebelum dibawa ke rumah sakit. Tindakan operatif terbatas seperti kecelakaan lalu lintas, persalinan dengan penyulit dan penyakit lain yang bersifat gawat darurat. Puskesmas perawatan sebagai puskesmas rawat inap tingkat pertama memberikan pelayanan kesehatan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dengan tinggal di ruang rawat inap puskesmas. Berikut ini perkembangan puskesmas rawat inap di Kabupaten Madiun Tahun 2013-2020.

Gambar 2.11 Jumlah Puskesmas Rawat Inap dibandingkan Target RPJMD Tahun 2013-2020



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun 2020

- ❖ Permasalahan :
 - a. Peningkatan puskesmas rawat jalan menjadi puskesmas rawat inap terkendala ketersediaan anggaran dan kebijakan dari pemerintah pusat;
 - b. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan status puskesmas rawat jalan menjadi puskesmas rawat inap.
- ❖ Solusi :
 - a. Pemeliharaan gedung pelayanan kesehatan harus didukung oleh data kondisi sarana prasarana melalui aplikasi e-planning Kementerian Kesehatan dan BAPPENAS untuk diusulkan perbaikan;
 - b. Pengajuan usulan anggaran melalaui Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar dalam rangka meningkatkan puskesmas rawat jalan menjadi puskesmas rawat inap serta pemenuhan sarana dan prasarana pendukung;
 - c. Koordinasi dengan lintas program terkait yaitu BAPPEDA Kabupaten Madiun dalam pengajuan usulan serta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam pelaksanaan kegiatan.

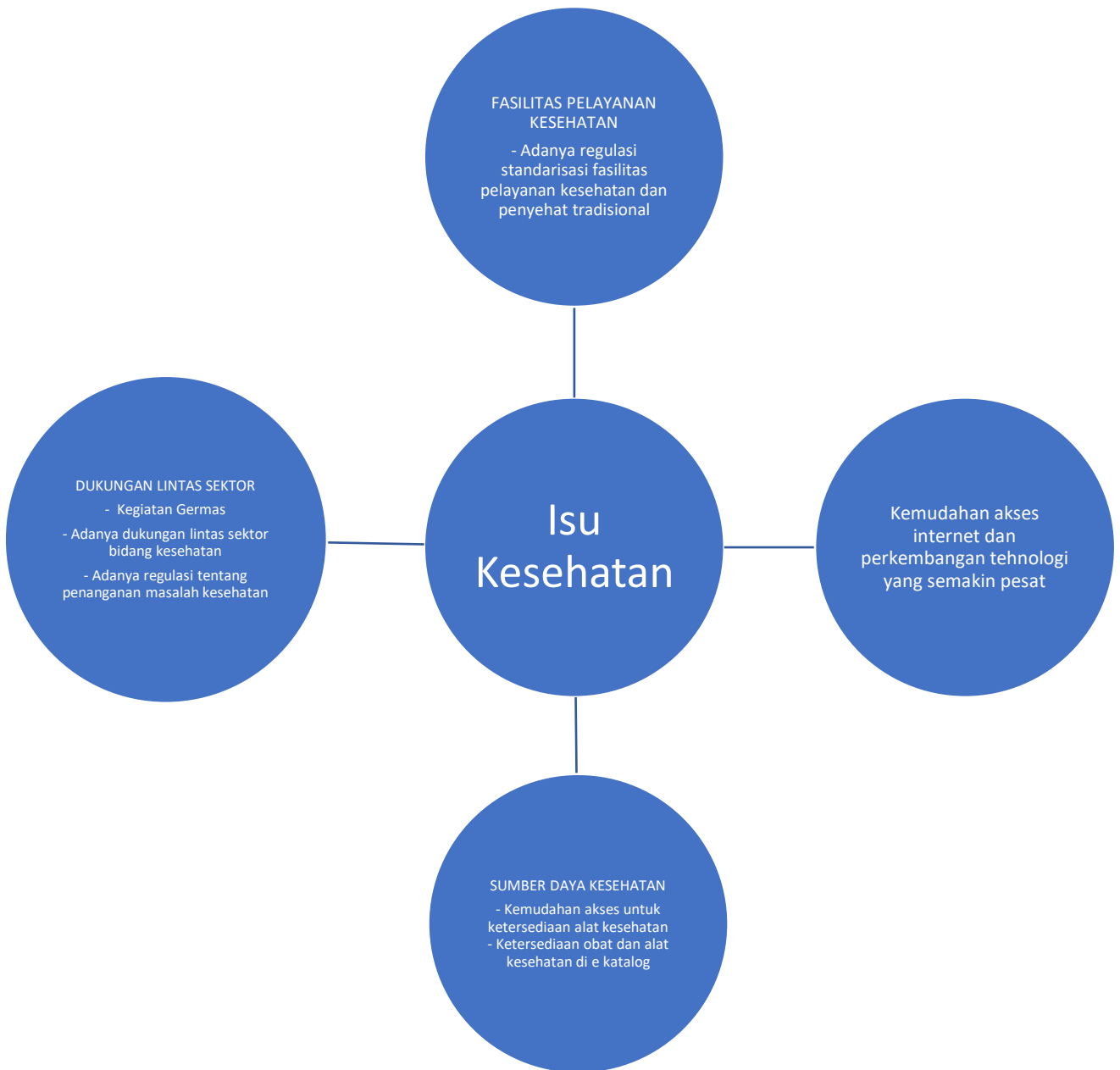
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan (isu) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan beserta jajarannya secara umum dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sulitnya mendapatkan gambaran yang tepat mengenai sasaran pelaksanaan kebijakan, masih kurang selarasnya intervensi terhadap permasalahan kesehatan, dan kekurangmampuan dalam pemetaan rencana tindak lanjut yang bersifat holistik dan berkesinambungan.

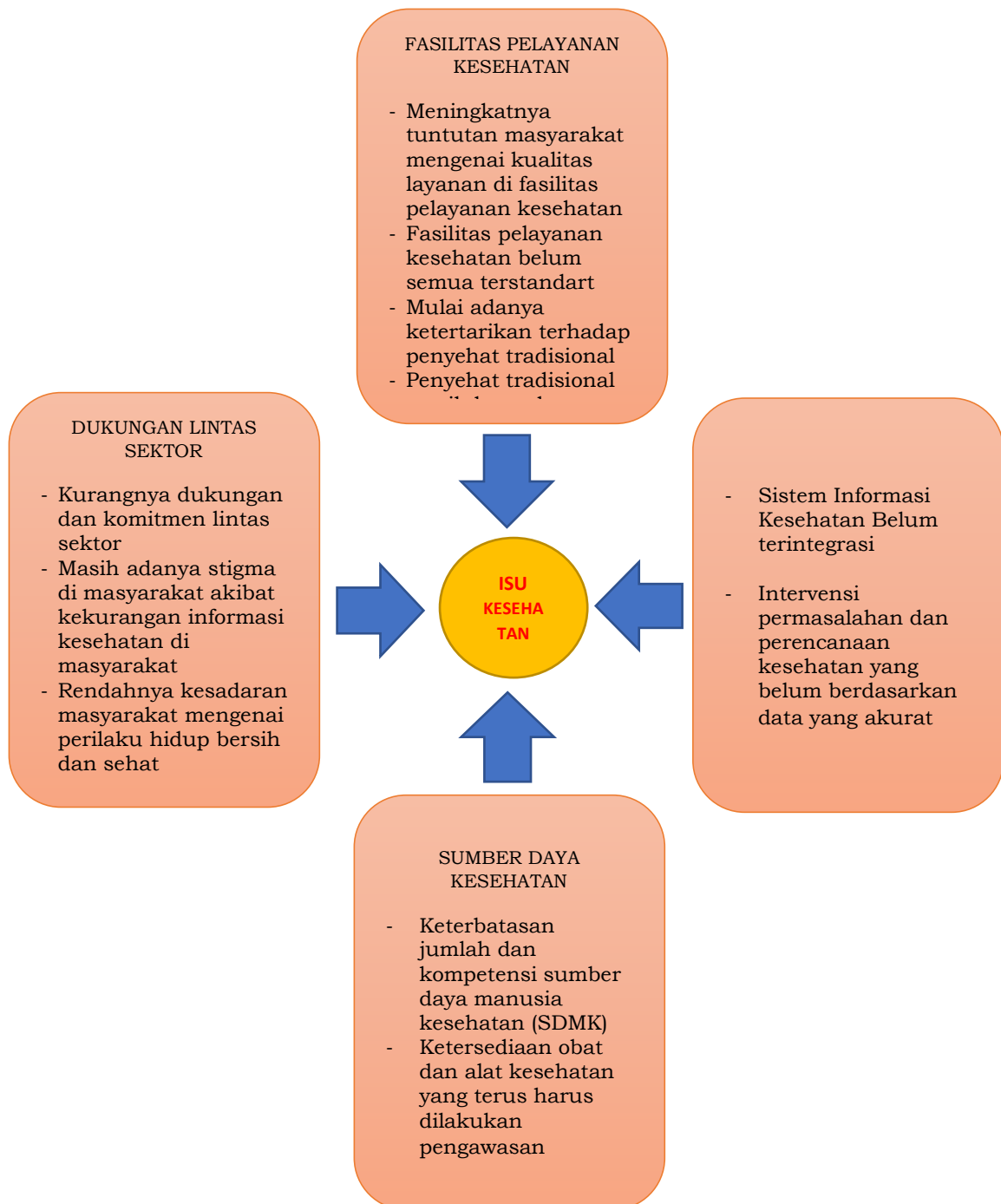
Dari setiap permasalahan tersebut, kemudian diidentifikasi tantangan dan peluang bagi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan beserta jajarannya. Identifikasi terhadap tantangan merupakan identifikasi terhadap kendala yang bersifat negatif yang akan dihadapi oleh suatu organisasi yang apabila berhasil diatasi akan memberikan peran yang besar dalam mencapai tujuan organisasi.

Peluang merupakan suatu keadaan positif ,yang apabila dimanfaatkan oleh sebuah organisasi dapat memberikan dampak yang besar terhadap tujuan organisasi. Analisa terhadap kedua faktor tersebut bermanfaat untuk melakukan perencanaan dalam upaya mengantisipasi masa depan dengan melakukan pengkajian berdasarkan pengalaman masa lampau, ditopang sumber daya dan kemampuan yang dimiliki saat ini yang akan diproyeksikan ke pengembangan pelayanan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun di masa mendatang.

Gambar 2.12
Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan



Gambar 2.13
Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan



BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun layaknya instansi atau satuan kerja perangkat daerah lainnya juga tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang diharapkan atau tidak diharapkan tetap harus dihadapi. Berdasarkan pada capaian/kondisi saat ini, terdapat permasalahan kesehatan sebagaimana tabel identifikasi sebagai berikut :

- a. Kurangnya SDM tenaga kesehatan yang profesional
- b. Tingginya angka kematian pada bayi dan ibu melahirkan
- c. Tingginya angka kematian akibat penularan penyakit
- d. Pelayanan kesehatan masyarakat terkait BPJS sering mengalami kendala seiring kurangnya informasi dan perubahan peraturan yang mengikat
- e. Transisi SOTK rumah sakit
- f. Peraturan terkait pelaksanaan kesehatan bagi masyarakat yang dikelola oleh BPJS sering mengalami perubahan sehingga terjadi kendala dalam pengaplikasian di masyarakat
- g. Keterbatasan sarana dan prasarana rumah sakit dalam pemenuhan kebutuhan dokter spesialis yang telah ada di Rumah Sakit Caruban serta kebutuhan pengembangan pelayanan dalam rangka memenuhi harapan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Madiun dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau, lengkap dan paripurna
- h. Kebijakan dan pelaksanaan *reward* dan *punishment* belum diaplikasikan secara menyeluruh

- i. Masih tingginya waktu tunggu pelayanan khususnya pelayanan loket rawat jalan, pelayanan poli rawat jalan, pelayanan laboratorium, pelayanan radiologi dan pelayanan farmasi
- j. Tingkat kepatuhan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) masih perlu ditingkatkan
- k. Penggunaan SIM RS belum optimal, khususnya e-resep, e-rekam medis dan pendaftaran online
- l. Promosi RS belum optimal

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.2.1 Isu-isu Strategis berdasarkan Analisis permasalahan

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Madiun yang diperoleh dari analisis permasalahan daerah dapat dikelompokkan menjadi enam aspek sebagai berikut :

- A. Pertumbuhan ekonomi kabupaten Madiun pada tahun 2019 belum mencapai target yang ditetapkan, bahkan capaiannya dibawah provinsi Jawa Timur. Target yang ditetapkan 5,71% sedangkan capaiannya hanya 5,42% lebih rendah dibandingkan capaian Provinsi Jawa Timur yakni 5,52%.
- B. Sistem tatakelola pemerintahan di Kabupaten Madiun juga masih perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, hal ini dikarenakan capaiam indeks reformasi birokrasi masih belum mencapai target yang ditetapkan. Indeks reformasi birokrasi menjadi cerminan kualitas pelayanan publik dan profesionalitas kinerja sumberdaya aparatur dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi kepala daerah. Pada tahun 2019 Indeks Reformasi Kab madiun hanya 70,45 dari target yang ditetapkan sebesar 77.

- C. Sebagai daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana, khususnya banjir maka pemerintah Kabupaten Madiun perlu memberikan perhatian pada persoalan Lingkungan Hidup. Hal ini dikarenakan indeks kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2019 hanya 75,94 sehingga belum mencapai target yang ditetapkan yakni 78,51. Persoalan lingkungan hidup perlu diperhatikan mengingat salah satu penyebab terjadinya bencana alam karena kurangnya perhatian terhadap daya dukung lingkungan.
- D. Kemiskinan di Kabupaten Madiun sepanjang tahun 2017 hingga tahun 2019 belum menunjukkan penurunan yang signifikan, sehingga jika dibandingkan dengan persentase kemiskinan Provinsi Jawa Timur, persentase kemiskinan di Kabupaten Madiun pada tahun 2019 masih lebih tinggi yakni 10,54% dan peringkat 16 terendah di Jawa Timur. Sehingga persoalan kemiskinan harus mendapatkan perhatian khusus dan intervensi dari pemerintah.
- E. Pendapatan asli daerah khususnya retribusi daerah perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, hal ini dikarenakan trend capaian terhadap target yang ditetapkan selalu mengalami penurunan. Bahkan capaian tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2013 kinerja pemerintah daerah mengalami -85%. Padahal retribusi menjadi salah satu sumber PAD yang masih berpeluang untuk dapat dikelola dengan baik.
- F. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Madiun yaitu 71,69 masih di atas IPM Provinsi yang hanya 71,50 dan berada di urutan 19 dari 38 kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur. Kendatipun demikian jika

dibandingkan dengan Kota Madiun, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Nganjuk IPM Kabupaten Madiun masih di bawah 3 daerah tersebut. Namun jika dilihat dari rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Madiun hanya 7,80 yang artinya masih rendah dan terdapat masyarakat Kabupaten Madiun yang hanya menempuh Pendidikan sampai Sekolah Dasar (SD) atau tidak lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan harapan lama sekolah yang berada di angka 13,14. Masyarakat Kabupaten Madiun pada saat ini berharap bisa menempuh Pendidikan hingga lulus Sekolah Menengah Atas (SMA).

3.2.2 Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Secara politis, visi merupakan manifestasi dari cita-cita kepala daerah dalam membangun sebuah daerah. Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi RPJMD Kabupaten Madiun tahun 2018-2023 tidak dapat disusun tanpa terlepas dari kesesuaian terhadap sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Madiun untuk periode RPJMD 2018 – 2023 sesuai dengan Visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN MADIUN AMAN, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK”

Dalam mewujudkan Visi tersebut, maka motto yang dipilih sebagai ikon semangat adalah, AYO APIK BARENG... Ayo Apik Bareng adalah seruan untuk menyatukan tekad mewujudkan kebaikan bersama di semua komponen masyarakat dan aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun secara utuh, bersinergi dan saling melengkapi.

Gambar 3.1 Konstruksi Pencapaian Visi Pembangunan



Visi Kabupaten Madiun dibangun dari nilai Aman, Mandiri, Sejahtera dan berakhlak.

Nilai dari visi Kepala daerah Kabupaten Madiun yaitu aman, mandiri, sejahtera dan berakhlak. Aman direpresentasikan pada misi 1 dan misi 2 yaitu mewujudkan rasa aman di masyarakat dan ASN. Mandiri diwujudkan pada misi 3 yaitu meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan. Sejahtera diwujudkan pada misi 4 yaitu Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan; dan berakhlak diwujudkan pada

misi 5 yaitu Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal.

Misi Pembangunan Daerah

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun tahun 2018 - 2023 berorientasi pada pembangunan sosial di masyarakat, ekonomi kerakyatan, pembangunan sumber daya yang unggul dan kesejahteraan desa.

Dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah Kabupaten Madiun yang telah ditetapkan diatas, maka berikut merupakan Misi Kepala Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 :

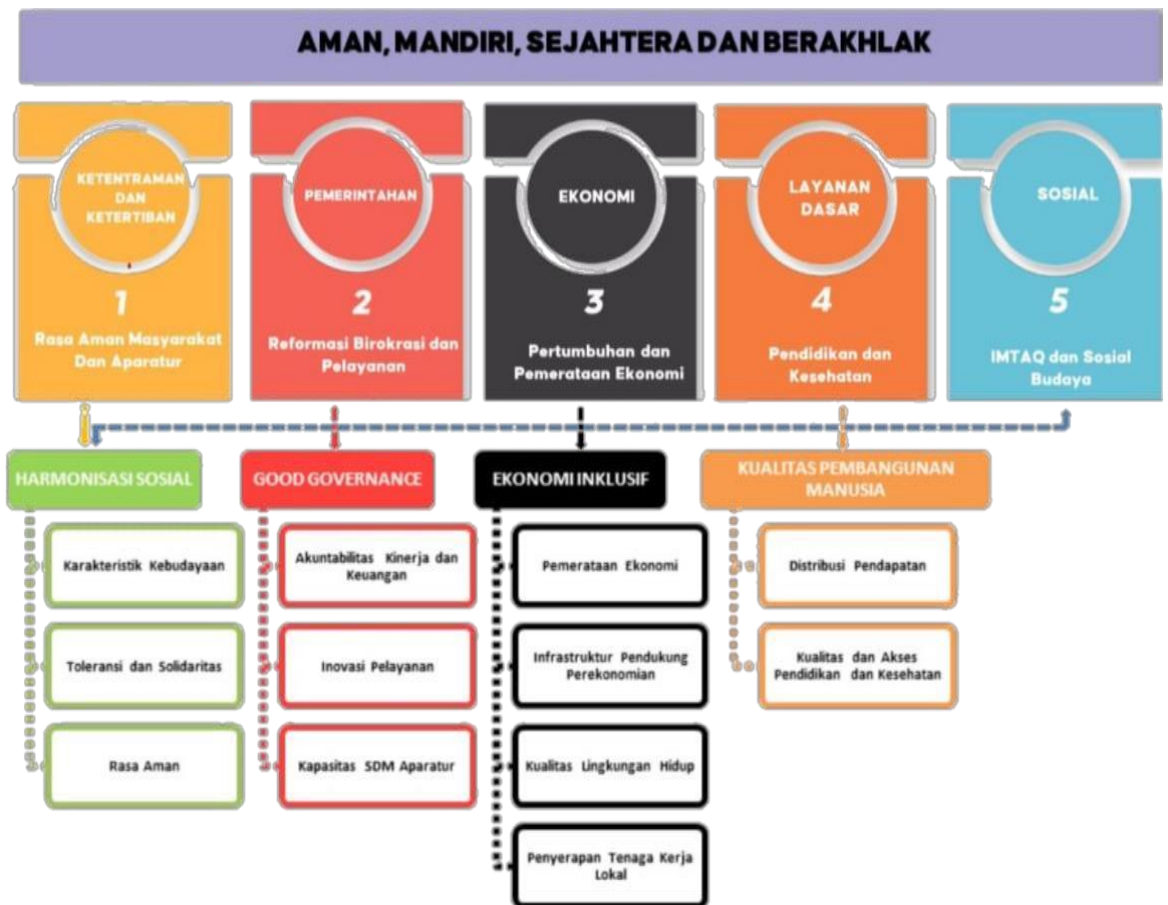
- Misi I : Mewujudkan rasa aman bagi seluruh Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun;
- Misi II : Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik
- Misi III : Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan
- Misi IV : Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan
- Misi V : Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal

Lima butir misi diatas merupakan janji politis Kepala Daerah Kabupaten Madiun terpilih kepada masyarakat Kabupaten Madiun. Merujuk terhadap revisi RPJMD Kabupaten Madiun tahun 2018-2023, Misi ke 1 dan Misi ke 5 mengalami rekonstruksi pada tujuan, yang mengakibatkan pada misi 1 dan misi 5 beririsan pada tujuan yang sama yaitu tentang peningkatan harmoni sosial di masyarakat yang meliputi tentang ketenteraman dan ketertiban, keberagaman agama dan budaya, serta solidaritas antar masyarakat. Misi 1 dan misi 5 di tuangkan menjadi satu tujuan,

yang esensinya saling terkait antara misi satu dan misi 5 tentang menciptakan kesalehan sosial.

Kesalehan sosial merupakan orientasi religius individu dimana tidak hanya berhubungan dengan Allah tetapi juga merupakan orientasi religius individu dalam berinteraksi dengan sesama. Kesalehan sosial dapat dimanifestasikan solidaritas sosial, toleransi dan ketenteraman ketertiban. Rekonstruksi tidak menghilangkan esensi dari kedua misi tersebut, hanya bertujuan untuk mendefinisikan tematik dan integratif.

Gambar 3-2 Rekonstruksi Misi dan Tujuan Sasaran RPJMD Perubahan Kabupaten Madiun



Lima butir Misi Pembangunan diatas didasarkan kepada kebutuhan pembangunan yang telah di fokuskan dalam bentuk Visi pembangunan daerah. Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap misi tersebut serta mengurangi potensi ambiguitas dalam memahami butir misi. Berikut digambarkan konstruksi substansi

misi Kabupaten Madiun Tahun 2018 -2023:

Gambar 3.3 Substansi misi Kabupaten Madiun



3.2.3 Misi Kepala Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 yang berhubungan dengan bidang Kesehatan, MISI 4 : “Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan”

Kesejahteraan dapat dilihat dan dicapai melalui berbagai macam sudut pandang, kesejahteraan dapat dicapai melalui pendekatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan lain sebagainya. Pendekatan pencapaian kesejahteraan melalui ekonomi berarti masyarakat dikatakan sejahtera jika masyarakat tersebut terbebas dari kemiskinan, sedangkan jika pendekatannya adalah melalui pendidikan, kesehatan, dan sosial maka kesejahteraan masyarakat dicapai melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pada misi keempat ini, pendekatan yang digunakan dalam upaya mencapai masyarakat yang sejahtera

adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.

Upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ditempuh melalui tiga pendekatan utama, yaitu mempermudah dan meningkatkan akses pendidikan, mempermudah dan meningkatkan akses kesehatan, dan meningkatkan distribusi pendapatan. Melalui tiga pendekatan tersebut, maka diharapkan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Madiun. Untuk lebih jelasnya mengenai penjabaran pencapaian misi ketiga tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.7

Langkah Pencapaian Misi ke-4 Urusan Pendidikan Urusan Kebudayaan



3.2.4. Tujuan Dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran RPJMD merupakan hasil dari perumusan capaian strategis Kabupaten Madiun yang merepresentasikan atau menjadi tolok ukur keberhasilan atau kegagalan pemerintah. Sehingga, syarat utama penentuan

tujuan dan sasaran adalah dapat diukur yang direpresentasikan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) atau indikator tujuan sebagai indikator keberhasilan bupati dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) atau indikator kinerja sasaran RPJMD.

Berikut merupakan linieritas Misi terhadap Tujuan Pembangunan Kabupaten Madiun.

Penjabaran Tujuan dan Sasaran pembangunan Perubahan RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018- 2023 pada Misi ke 4:

Tujuan pembangunan ke empat Kabupaten Madiun merupakan penjabaran dari Misi 4 yakni Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan. Secara umum beberapa catatan terhadap Misi 4 Kabupaten Madiun tidak banyak perubahan di tujuan tetapi perubahan mendasar ada di level sasaran. Sasaran difokuskan pada komposit di indeks pembangunan manusia yaitu daya beli masyarakat, pendidikan dan kesehatan

Dalam rangka pencapaian Misi 4 tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

- **Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan**, dengan sasaran pembangunan:
 1. Terciptanya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat;
 2. Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas pelayanan pendidikan dan Kesehatan

Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap tujuan dan sasaran sebelum maupun sesudah rekonstruksi misi yang dilakukan, maka pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran disajikan dalam desain yang mudah dipahami melalui Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi 4 disajikan sebagai berikut:

Gambar 3.11 Cascading Misi Ke-4



- **konsistensi Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD menjadi tuntutan yang perlu diperhatikan. Konsistensi penjabaran Visi dan Misi kedalam Tujuan dan Sasaran menentukan efektivitas pembangunan daerah sesuai dengan amanat pembangunan yang tertuang dalam Visi dan Misi Bupati terpilih. Berangkat dari tuntutan tersebut, maka dapat dijabarkan konsistensi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut kedalam matriks berikut ini.

Tabel 3.1 Matriks Konsistensi Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

NO	MISI	visi : terwujudnya Kabupaten Madiun aman, mandiri, sejahtera dan berakhlak			Target capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	2021	2022	2023
1	Mewujudkan rasa aman bagi seluruh Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun Mewujudkan masyarakat berakhlak mulai dengan meningkatkan kehidupan beragama, mengedepankan kearifan lokal	Membangun Harmonisasi Sosial yang berpondasi dari nilai religius dan Kearifan Lokal	Menguatkan karakteristik kebudayaan	Indeks Kesalehan Sosial	65,69	67,55	69,36
				Persentase budaya lokal Yang dilestarikan	60%	65%	70%
			Terwujudnya nilai – nilai keagamaan dan Gotong royong dalam kehidupan masyarakat	Indeks Toleransi	46,74	47,11	47,49
				Indeks Solidaritas	53,55	53,98	54,41
				Indeks Stabilitas	54,46	56,92	57,97
2	Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance) untuk pelayanan publik	Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	73,10	73,50	73,80
				Nilai SAKIP	A	A	A
				Opini atas Audit BPK	WTP	WTP	WTP
				Tingkat Maturitas SPIP	3,3	3,4	3,5
		Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah	Indeks Profesionalisme Aparatur	80,50	81	81,50	

			Meningkatnya Inovasi Layanan Publik berbasis Transformasi Digital	Indeks SPBE	3,7	4,3	4,9
				Nilai IKM	81,95	83,95	86,20
3	Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan			Angka Pertumbuhan Ekonomi	3,87	4,53	4,85
				Angka Kemiskinan	11,81%	11,81%	11,80%
		Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Inklusif, Mandiri dan Berkelanjutan	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan mandiri	Pertumbuhan PDRB Unggulan (Pertanian, Industri, Perdagangan)	3%	4%	5%
				Pengeluaran Wisatawan	195 juta	202 juta	260 juta
				Persentase Desa Mandiri	9,6%	19,7%	32,3%
		Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur perekonomian	Terjaganya Keseimbangan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	76	77	78
				IKLH	80	80	80
				Indeks Risiko Bencana Daerah	138,08	138,08	138,08
Meningkatnya Penyerapan Tenaga kerja Lokal		Tingkat Pengangguran Terbuka	4,5	4,25	4		
4	Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan	Meningkatkan Kualitas dan aksesibilitas pelayanan	Terciptanya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,80	72	72,20

		pendidikan dan kesehatan	Meningkatnya Kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Pengeluaran perkapita makanan	21%	19%	17%
			Meningkatnya Kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Indeks Kesehatan	0,79	0,80	0,80
				Indeks Pembangunan Gender	91,6	91,8	92
				Indeks Pendidikan	0,630	0,635	0,640

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Renstra Kementerian Kesehatan

A. Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan

Guna mewujudkan Misi Presiden dalam Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024, Kementerian Kesehatan menetapkan 5 (lima) Tujuan Strategis, yakni:

- Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup
- Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
- Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
- Peningkatan sumber daya kesehatan
- Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif

B. Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan

Dalam rangka mencapai 5 (lima) Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan tersebut di atas, ditetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategis sebagai berikut:

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran strategis kementerian Kesehatan

No	Tujuan Strategis	No	Sasaran Strategis
1	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup	1	Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat
2	Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	2	Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan
3	Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat	3	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4	Peningkatan sumber daya kesehatan	4	Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan
		5	Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar
		6	Terjaminnya pembiayaan kesehatan

5	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	7	Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
		8	Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan

3.3.2. Renstra Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Dalam rangka mewujudkan sasaran jangka menengah Kementerian Kesehatan dan Visi Misi Gubernur Jawa timur dalam bidang kesehatan maka perlu dilakukan identifikasi Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan serta Penanganannya.

Tabel 3.3 Faktor Penghambat dan pendorong keberhasilan penyelesaian permasalahan Kesehatan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi	Sebagai Faktor	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Renstra Kementerian Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lemahnya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah dalam hal keterkaitan program dan pendanaan 2. Kualitas lulusan tenaga kesehatan belum siap pakai 3. Efektifitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran yang seringkali tidak tepat waktu 4. Akreditasi, sertifikasi dan registrasi menjadi kewenangan pusat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum sinkronnya menu program pusat dengan prioritas daerah 2. Belum ada standarisasi kompetensi lulusan tenaga kesehatan 3. Penerbitan e-katalog dan alat kesehatan dari LKPP tidak tepat waktu 4. Banyak daerah sulit yang tidak termasuk dalam kategori DTPK. 5. Regulasi yang diterbitkan Kemenkes hanya didasarkan pada standar minimal belum mengakomodir kebutuhan pengembangan pelayanan kesehatan di Jawa Timur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akreditasi institusi pendidikan kesehatan 2. Regulasi tentang Internship lulusan dokter umum 3. UU 14/2008 dan PP 61/2010 tentang keterbukaan informasi publik mendorong transparansi dan akuntabilitas kinerja pelayanan kesehatan

Berdasarkan visi dan misi Gubernur Jawa Timur Tahun 2019-2024, maka Tujuan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur adalah Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, dengan Sasaran Jangka Menengah adalah :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan
2. Meningkatkan Status Kesehatan Keluarga
3. Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Mendasar Renstra kementerian kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur maka akan ditentukan Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi Renstra K/L dan Renstra Provinsi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Permasalahan dan Akar Masalah Pelayanan SKPD

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
	Status Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak Balita yang masih rendah	Angka Kematian Ibu (AKI) belum mencapai target yang ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas pelayanan kesehatan ibu yang belum memadai berdasarkan cakupan K4 - Belum semua ibu bersalin melahirkan di fasilitas kesehatan berdasarkan cakupan Pf - Masih ada persalinan yang ditolong oleh dukun - Belum semua ibu nifas mendapat layanan berkualitas berdasarkan cakupan Kf - Belum semua neonatal mendapat pelayanan berkualitas berdasarkan cakupan KN - Pemanfaatan buku KIA belum optimal, masih ada ibu hamil yang tidak memiliki buku KIA - Belum semua fasilitas kesehatan memanfaatkan buku KIA

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
		Gizi buruk dan stunting yang masih terjadi di masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya akses terhadap makanan bergizi, rendahnya asupan vitamin dan mineral, dan buruknya keragaman pangan dan sumber protein hewani - Rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan termasuk akses sanitasi dan air bersih
	Masih Tinggi Angka Kesakitan	Akreditasi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan masih kurang untuk mempersiapkan Universal Health Coverage pada Tahun 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dan Jenis tenaga kesehatan di FKTP masih ada yang belum memenuhi standar - Jenis dan jumlah Sarana, Prasarana dan Alat kesehatan masih ada yang kurang memenuhi standar. - Kurangnya tenaga pendamping akreditasi FKTP di Kabupaten. - Kurangnya Komitmen manajemen RS untuk ikut akreditasi - Ketersediaan SDM (dokter spesialis) di RS kurang - Mahalnya biaya akreditasi - Tingkat pemahaman Manajemen RS tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan operasional rumah sakit masih rendah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
		Meningkatnya angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit tidak menular dan penyakit menular	<p>Cakupan imunisasi rutin pada bayi masih rendah, walaupun tinggi tetapi tidak merata di seluruh desa/kelurahan.</p> <p>Penyebabnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas di desa tidak mengetahui dengan benar sasaran imunisasi. b. Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) tidak berjalan c. Monev paska imunisasi rutin tidak dilakukan d. Kegiatan evaluasi paska Posyandu untuk kunjungan rumah tidak dilakukan <p>Imunisasi Baduta masih belum menjadi imunisasi wajib dan rutin.</p> <p>Penyebabnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ortu menolak imunisasi lanjutan karena merasa sudah lengkap saat usia bayi b. Petugas imunisasi desa tidak memiliki data sasaran Baduta yang valid
		Kondisi Kesehatan Lingkungan tidak sehat dan masih rendahnya akses sanitasi dasar	Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat untuk menjadikan sanitasi sebagai kebutuhan

Tabel 3.5. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur

No	Misi Dan Program Bupati Madiun	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>Misi 4 : “Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan”</p> <p>Meningkatkan Kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan</p>	1. Angka Kematian Ibu (AKI) belum mencapai target yang ditetapkan	<p>1. SDM Kesehatan belum memadai</p> <p>2. Fasilitas / Sarana prasarana belum memadai</p> <p>3. Sistem Rujukan belum optimal</p> <p>4. Pembiayaan Kesehatan masih kurang</p> <p>5. <i>Policy/</i> Regulasi masih kurang</p> <p>6. Koordinasi lintas program belum terpadu</p>	<p>1. Jumlah SDM bidan dan perawat cukup</p> <p>2. Pergub no 4 tahun 2010 tentang Ponkesdes</p>
		2. Prevalensi stunting yang masih tinggi	<p>1. Adanya kantong-kantong gizi kurang di wilayah Jawa Timur</p> <p>2. Koordinasi lintas program belum terpadu</p>	
		3. Akreditasi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan masih kurang untuk mempersiapkan Universal Health Coverage pada Tahun 2019	<p>1. Kesiapan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan terbatas untuk mencapai kelas akreditasi</p>	<p>1. Permenkes Nomor. 99 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No 71 Tahun 2013 tentang</p>

No	Misi Dan Program Bupati Madiun	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			2. Kebutuhan anggaran yang cukup besar untuk pemenuhan akreditasi pelayanan kesehatan	Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional. 2. Meningkatkan tuntutan terhadap jaminan mutu pelayanan kesehatan oleh masyarakat
		4. Meningkatnya angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit menular dan tidak menular	Perubahan lingkungan yang begitu pesat yang dapat memunculkan re-emerging disease dan penyakit Potensial KLB	1. Universal Health Coverage 2. Peraturan pemerintah tentang penanggulangan wabah
		5. Rendahnya akses terhadap kualitas lingkungan sehat	1. Belum semua kabupaten/kota memiliki regulasi yg mengatur kesling 2. Daerah berpenduduk besar dan rumah yang padat 3. Masyarakat belum menjadikan sanitasi sebagai kebutuhan	1. Kerjasama dengan program penyediaan sarana sanitasi lewat IPAL komunal, pengelolaan sampah instalasi air minum dan sanitasi sekolah, sanitasi terminal, pasar sehat 2. Penggunaan media tv, media cetak dan elektronik, dan sosial media untuk promosi kesling

No	Misi Dan Program Bupati Madiun	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		6. Belum semua penduduk Kabupaten Madiun menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional	1. Jaminan kesehatan belum menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat 2. Masih banyak penduduk yang tidak memiliki persyaratan lengkap untuk bisa didaftarkan sebagai peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran)	Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 137 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Timur

Kesimpulan dari telaahan Renstra Kementerian Kesehatan, dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, dengan memperhatikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Bupati / Wakil Bupati terpilih, terhadap tujuan dan sasaran yang dapat disinergikan adalah sebagai berikut :

1. Menurunkan angka kematian ibu
2. Menurunkan angka kematian bayi
3. Menurunkan prevalensi stunting.
4. Meningkatkan upaya perilaku hidup bersih dan sehat.
5. Meningkatkan pengendalian pada Penyakit menular.
6. Meningkatkan Pengendalian pada penyakit tidak menular
7. Mewujudkan semua Puskesmas Re akreditasi dengan hasil lebih optimal.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Madiun.

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 tahun 2011 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun tahun 2009-2029, maka pada pasal 40 ayat 1 dijelaskan bahwa Kebijakan kawasan strategis pengembangan ekonomi, meliputi :

1. peningkatan dan pemantapan fungsi dan peran perkotaan Mejayan sebagai pusat kegiatan ekonomi baru di Kabupaten Madiun dengan skala pelayanan kabupaten;
2. peningkatan dan pengembangan kawasan agropolitan, ekowisata, agroforestri dan agrowisata sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun; dan
3. peningkatan dan pengembangan kawasan perbatasan sebagai kawasan strategis bagi Kabupaten Madiun.

Sedangkan pada ayat 2 dijelaskan bahwa strategi peningkatan dan pemantapan fungsi dan peran perkotaan Mejayan sebagai pusat kegiatan ekonomi baru di Kabupaten Madiun dengan skala pelayanan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

1. menyediakan sarana dan prasarana atau infrastruktur yang dibutuhkan untuk pengembangan kawasan perkotaan skala kabupaten;
2. memaksimalkan pengembangan kawasan melalui peningkatan nilai ekonomi kawasan;
3. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM); dan
4. mendukung kebijakan melalui pemberian instrumen insentif berupa keringanan pajak/ retribusi, pengurangan atau penghapusan pajak, dan lain sebagainya.

Implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Kesehatan ditinjau dari implikasi RT RW

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Peningkatan mutu dan jangkauan layanan kesehatan masyarakat.	- kebijakan pemerintah terkait dengan Jaminan pelayanan kesehatan - Terjadinya pandemic covid 19	Masih adanya sarana prasarana pelayanan kesehatan sehubungan dengan pembiayaan kesehatan dan perubahan kebijakan penganggaran
2.	Pengembangan sumberdaya manusia kesehatan	- kebijakan pemerintah terkait dengan Jaminan pelayanan kesehatan - Terjadinya pandemic covid 19	Masih kurangnya jumlah sarana prasarana pelayanan kesehatan sehubungan dengan pembiayaan kesehatan dan perubahan kebijakan penganggaran

Permasalahan bidang kesehatan masih seputar beban ganda perkembangan penyakit menular dan tidak menular serta masih tingginya angka kematian ibu dan bayi serta munculnya kasus stunting yang bisa menurunkan kualitas sumberdaya manusia dimasa mendatang. Berdasarkan permasalahan tersebut maka ada 2 (dua) hal yang harus dilakukan sehubungan dengan rencana pengembangan Kawasan strategis di kabupaten madiun yaitu

1. Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan. Upaya ini bertujuan untuk menurunkan risiko permasalahan kesehatan, diharapkan dengan infrastruktur bidang kesehatan yang baik dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sehingga dapat mendorong sector lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pemerintah pusat dan terjadinya pandemic covid 19 harus dijadikan pendorong untuk terus meningkatkan derajat kesehatan melalui pengembangan dan peningkatan infrastruktur bidang

kesehatan.

2. Pengembangan sumberdaya manusia kesehatan. Pengembangan dan peningkatan infrastruktur bidang kesehatan harus diimbangi dengan kemampuan sumberdaya manusia kesehatan yang baik agar bisa memberikan pelayanan kesehatan semaksimal mungkin. Sumberdaya manusia kesehatan merupakan asset yang harus dijaga agar mampu meningkatkan derajat kesehatan yang diawali dengan penyelesaian permasalahan kesehatan.

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Apabila prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari. Potensi dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup yang mungkin ditimbulkan oleh suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, sebelum pengambilan keputusan dilakukan, dapat diantisipasi melalui KLHS. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) khususnya dalam pasal 15 mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023 juga wajib untuk dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui mekanisme antara lain pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan / atau program terhadap kondisi lingkungan hidup (dengan tahapan melaksanakan identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan, melaksanakan identifikasi materi muatan kebijakan, rencana dan / program, dan menganalisis pengaruh kebijakan, rencana dan / atau program terhadap isu pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup), perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau Program serta penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dalam KLHS RPJMD Kabupaten Madiun telah diidentifikasi dan dirumuskan isu pembangunan berkelanjutan prioritas sebagai berikut :

1. Dimensi sosial : kualitas tenaga pendidik, fasilitas belajar mengajar, kualitas pendidikan, aksesibilitas terhadap air minum, jumlah sarana dan prasarana kesehatan, kesempatan kerja, jumlah pengangguran kaum muda/terdidik, kualitas dan produktivitas SDM pencari kerja, kualitas sumber daya manusia/peningkatan kesejahteraan masyarakat (IPM), penanganan masalah

kesejahteraan dan penguatan nilai – nilai agama dan nilai luhur budaya lokal

2. Dimensi Ekonomi : pasar, sarana pendidikan, sarana kesehatan, pengembangan infrastruktur dan kemajuan desa
3. Dimensi Lingkungan : Kekeringan, Ruang Terbuka Hijau (RTH), Sampah, TPS/TPA, kualitas air, dan kuantitas air
4. Dimensi kelembagaan : pelayanan publik, pemerintahan yang bersih, transparan dan keterbatasan pembiayaan pembangunan

Impikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat ditinjau dari implikasi KLHS

No.	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1.	Peningkatan mutu dan jangkauan layanan kesehatan masyarakat	- kebijakan pemerintah terkait dengan Jaminan pelayanan kesehatan menuju total covered	- Masih adanya masyarakat yang belum mempunyai jaminan kesehatan dan perubahan kebijakan penganggaran
		- kebijakan pemerintah terkait dengan peningkatan kualitas sarana prasarana kesehatan. Dan mutu pelayanan kesehatan	- Masih kurangnya pemenuhan sarana prasarana pelayanan kesehatan sehubungan dengan perubahan kebijakan penganggaran. - Terjadinya pandemic covid 19

Salah satu faktor yang menentukan status kesehatan masyarakat adalah perkembangan penyakit menular dan tidak menular serta masih tingginya angka kematian ibu dan bayi serta munculnya kasus stunting yang bisa menurunkan kualitas sumberdaya manusia dimasa mendatang. Berdasarkan permasalahan tersebut maka ada 2 (dua) hal yang harus dilakukan sehubungan dengan kajian lingkungan hidup dan isu strategis di

kabupaten madiun yaitu

1. Peningkatan mutu yang baik layanan kesehatan adalah adalah tersedia dan terjangkau , tepat kebutuhan, tepat sumber daya, tepat standar profesi / etika profesi, wajar dan aman, mutu memuaskan bagi pasien yang dilayani. Jadi melalui pengembangan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan dan sistem pelayanan yang cepat dan tepat. Upaya ini bertujuan untuk menurunkan risiko permasalahan kesehatan, diharapkan dengan peningkatan mutu dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sehingga dapat mendorong sector lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pemerintah pusat dan terjadinya pandemic covid 19 harus dijadikan pendorong untuk terus meningkatkan derajat kesehatan melalui pengembangan dan peningkatan infrastruktur bidang kesehatan.
2. Pengembangan sumberdaya manusia kesehatan. Pengembangan dan peningkatan infrastruktur bidang kesehatan harus diimbangi dengan kemampuan sumberdaya manusia kesehatan yang baik agar bisa memberikan pelayanan kesehatan semaksimal mungkin. Sumberdaya manusia kesehatan merupakan asset yang harus dijaga agar mampu meningkatkan derajat kesehatan yang diawali dengan penyelesaian permasalahan kesehatan.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

1. Metode penentuan isu strategis

Metode penentuan isu-isu strategis di pelayanan SKPD dilakukan dengan cara:

- a. Dibahas melalui forum Focussed Group Discussion (FGD) dengan melibatkan seluruh stake holder di Dinas Kesehatan,
- b. Menggunakan metode pembobotan dengan cara sebagai berikut:

Tabel 3.6. Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
	Total	100

- c. Menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan, dengan mengisi tabel.

2. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan pada Dinas Kesehatan sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis pada Dinas Kesehatan yang akan ditangani pada periode Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.7. Nilai Skala Kriteria Isu-Isu Strategis

No	Isu Strategis	Nilai skala Kriteria ke ...						Total
		1	2	3	4	5	6	
1.	Angka kematian bayi dan Angka kematian	176	94	176	62	108	226	842
2.	Peningkatan cakupan penduduk dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan	183	93	174	67	108	227	852
3.	Perbaikan sanitasi dasar dan kualitas air bersih	169	77	187	81	111	210	835
4.	Tercapainya kabupaten bebas buang air sembarangan (BABS) /	123	76	175	69	106	178	727
5.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam Pelaksanaan	165	81	154	69	105	209	783
6.	Penguatan strategi dalam penurunan prevalensi stunting	180	69	174	71	121	221	836
7.	Peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung pelayanan kesehatan sesuai	171	61	160	63	118	204	777
8.	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM	163	71	186	60	104	197	781
9.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui pemantapan	163	61	175	71	105	204	779
10.	Penguatan strategi penanganan penyakit menular dan tidak	153	53	159	66	110	175	716
11.	Pengembangan system informasi kesehatan yang terpadu	123	77	175	71	118	197	761
12.	Kondisi mobil puskesmas keliling	117	64	161	70	105	192	709

- Menghitung rata-rata skor/bobot setiap isu strategis dengan mengakumulasikan nilai tiap-tiap isu strategis dibagi jumlah peserta

Tabel 3.8. Rata Rata Skor isu-Isu Strategis

No	Isu-isu strategis	Total Skor	Rata-rata
1.	Angka kematian bayi dan Angka kematian Ibu	842	84,2
2.	Peningkatan cakupan penduduk dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan	852	85,2
3.	Perbaikan sanitasi dasar dan kualitas air bersih	835	83,5
4.	Tercapainya kabupaten bebas buang air sembarangan (BABS) / Open Defecation Free (ODF)	727	72,7
5.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam Pelaksanaan PHBS	783	78,3
6.	Penguatan strategi dalam penurunan prevalensi stunting	836	83,6
7.	Peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung pelayanan kesehatan sesuai dengan	777	77,7
8.	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Kesehatan	781	78,1
9.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	779	77,9
10.	Penguatan strategi penanganan penyakit menular dan tidak menular	716	71,6
11.	Pengembangan sistem informasi kesehatan yang terpadu	761	76,1
12.	Kondisi mobil puskesmas keliling	709	70,9

1.5. Penetapan Isu Strategik

Dari hasil forum Focussed Group Discussion (FGD), ditetapkan isu stratejik sebagai berikut:

- Angka kematian bayi perakhir tahun 2018 sebanyak 6,47 per 1000 kelahiran jauh lebih baik dari capaian rata - rata nasional yaitu sebanyak 22,23 per 1.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu tahun tahun 2018 tercapai sebesar 65,80 per 100.000 kelahiran hidup, angka ini menunjukkan keberhasilan

yang baik karena jauh dibawah rata-rata nasional 305 per 100.000 kelahiran hidup. Walaupun angka AKI dan AKB sangat bagus, namun demikian karena angka tersebut mendukung status keluarga sehat, maka komitmen kami untuk terus mempertahankan bahkan meningkatkan pada angka yang lebih baik.

2. Peningkatan Cakupan penduduk dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan. Cakupan Penduduk yang mempunyai Jaminan pemeliharaan kesehatan sampai dengan akhir tahun 2018 masih pada kisaran angka 55,6 %, sehingga perlu upaya untuk percepatan universal coverage kepesertaan JKN sebagai perwujudan program pemerintah.
3. Perbaikan sanitasi dasar dan kualitas air bersih. Cakupan sanitasi dasar di kabupaten Madiun mencapai 79,03% dan cakupan pemanfaatan air bersih di masyarakat mencapai 93,37%. Secara umum cakupan pelayanan sanitasi dasar di masyarakat sudah baik namun tetap harus dipertahankan dan ditingkatkan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
4. Tercapainya kabupaten bebas buang air sembarangan (BABS) / Open Defecation Free (ODF). Akses jamban di masyarakat sudah cukup baik (95%) tetapi untuk mendukung program pemerintah melalui Permenkes No.852/2008 tentang sanitasi total berbasis masyarakat melaksanakan program unggulan mengatasi penyakit diare berbasis kewilayahan yaitu program Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) atau open defecation free (**ODF**) harus ditingkatkan termasuk perubahan perilaku masyarakat untuk tidak buang air besar di sembarang tempat.
5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan PHBS. Cakupan Rumah tangga PHBS (Perilaku Hidup Bersih & Sehat) yang pada akhir tahun 2018 baru tercapai pada angka 50,23 %

artinya pada target keluarga sehat PHBS masih sangat perlu dioptimalkan

6. Penguatan strategi dalam penurunan prevalensi stunting. Status gizi Balita merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara penilaian status gizi Balita adalah dengan pengukuran antropometri yang menggunakan indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U) maupun menurut Tinggi Badan (BB/TB). Kondisi ini sangat perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti dengan beberapa upaya yang bisa dilakukan.
7. Peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung pelayanan kesehatan sesuai standart. Infrastruktur pelayanan kesehatan merupakan syarat utama untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Salah satu infrastruktur yang memerlukan perhatian adalah sarana dan prasarana puskesmas sebagai pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama. Melalui tercukupinya sarana prasarana di pelayanan kesehatan maka diharapkan dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Kondisi bangunan saat ini masih adanya Puskesmas dengan kondisi baik dan rusak ringan hanya sebanyak 3 Puskesmas, sedangkan 3 Puskesmas dalam kondisi rusak sedang dan 35 Puskesmas Pembantu dalam kondisi rusak berat. Kondisi seperti ini perlu perbaikan atau pembangunan gedung Puskesmas dan Puskesmas Pembantu agar layanan kesehatan yang baik bagi masyarakat terwujud
8. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Kesehatan. Dinas Kesehatan sudah melakukan perencanaan kebutuhan tenaga (sumber daya manusia kesehatan) tetapi dalam pemenuhan kebutuhan tenaga yang ada (SDM Kesehatan) belum menggunakan hasil dari perencanaan

mengingat keterbatasan penganggaran dalam proses rekrutmen.

9. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui pemantapan akreditasi. Puskesmas sampai dengan tahun 2018 telah terakreditasi sebanyak 26 dari 26 Puskesmas dan 58 Puskesmas Pembantu, sehingga sebagai bentuk upaya optimalisasi layanan kesehatan kepada masyarakat perlu dilakukan reakreditasi dan meningkatkan strata akreditasi pada tahun 2019 dan seterusnya untuk semua Puskesmas secara bertahap
10. Penguatan strategi penanganan penyakit menular dan tidak menular sesuai dengan standart. Sulitnya melakukan pengendalian khusus pada kasus penyebaran HIV/AIDS. Angka kesakitan HIV/AIDS makin tahun makin meningkat bahkan pada akhir tahun 2018 sudah mencapai angka 1,845 kasus. Meningkatnya usia harapan hidup berdampak pada meningkatnya jumlah Lansia, Jumlah Lansia di Kabupaten Madiun per akhir tahun 2018 lebih kurang sebanyak 111,172 ribu jiwa(16,35%) dari 679.888 jiwa sehingga munculnya upaya untuk menjamin para Lansia tetap mempunyai kondisi fisik dan mental yang prima, tetap sehat dan berdaya. Cakupan pelayanan usia lanjut sampai dengan akhir tahun 2018 baru pada angka 49,01 % sehingga masih perlu dioptimalkan.
11. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan yang terpadu. Sistem Informasi kesehatan yang dikembangkan oleh dinas kesehatan kabupaten Madiun adalah E Link. Sistem informasi kesehatan ini juga bisa bridging dengan program BPJS (P Care) dan Laporan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Program E link ini akan terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan data kesehatan sehingga tercapai system informasi kesehatan yang terintegrasi

BAB IV

TUJUAN dan SASARAN

Visi Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun periode tahun 2018 – 2023, yaitu:

”TERWUJUDNYA KABUPATEN MADIUN AMAN, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK”

Visi tersebut mengandung tiga unsur pokok visi utama, yaitu **”Aman”**, **”Mandiri”**, **”Sejahtera”** dan **”Berkelanjutan”**. Makna dari tiga unsur Visi tersebut adalah sebagai berikut ;

- a. **Aman** ; artinya kondisi yang pasti, tidak meragukan, tidak mengandung risiko, tidak merasa takut atau khawatir, bebas dari bahaya, bebas dari gangguan dan tenteram bagi masyarakat dan ASN
- b. **Mandiri** ; artinya keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain dengan menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yg ditopang oleh penguasaan iman, ilmu, dan teknologi yg berperadaban.
- c. **Sejahtera** ; adalah kondisi sentosa dan makmur, tidak ada ketimpangan antar wilayah, antar golongan, antar masyarakat dalam hal pembangunan, pelayanan, hak sipil, hak politik dan pemerintahan.
- d. **Berakhlak** : *adalah* berperilaku, bersikap, berbuat, adab dan sopan santun yang sesuai dengan tuntunan agama yang dianut masing-masing serta bermoral dan bersusila menggunakan tolok ukur norma-norma yang tumbuh dan berkembang dan berlangsung dalam masyarakat (adat istiadat/ budaya lokal) terobosan-terobosan baru guna mewujudkan cita-cita pembangunan Kabupaten Madiun.

Sebagai penjabaran dari Visi RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 yaitu ” **TERWUJUDNYA KABUPATEN MADIUN AMAN, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK**”, maka rumusan visi tersebut perlu dioperasionalisasikan ke dalam beberapa Misi.

Adapun visi dan misi Dinas Kesehatan harus merujuk pada misi RPJMD utamanya pada **misi ke 4** yaitu: “Meningkatkan Kualitas Pembangunan Masyarakat” dengan **tujuan : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Masyarakat** dan **sasaran : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat**

4.1. TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Visi dan misi Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan oleh Bupati Madiun dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Dalam rangka merealisasikan tugas pokok Dinas Kesehatan untuk mengatur fungsi pelayanan kesehatan bagi masyarakat Madiun, maka diperlukan rumusan tujuan dan sasaran-sasaran strategis tahun 2019-2023 yang lebih jelas yaitu menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya dukungan terhadap perwujudan capaian visi, misi, tujuan dan sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Madiun.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun memperhatikan Visi – Misi Bupati terpilih adalah: “**Meningkatkan Kualitas Pembangunan Masyarakat**” dengan sasaran “**Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat**” dengan didukung tatakelola keuangan

dan tata kelola kinerja yang baik Secara terinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Rencana Capaian		
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas pelayanan pendidikan dan Kesehatan	Indeks Kesehatan			0.80	0.81	0.82
			Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	Index Keluarga Sehat	0.2	0.205	0.21
				Umur Harapan Hidup	71.54	71.7	71.86

Keluarga Sehat adalah keluarga **yang memenuhi IKS (Indeks Keluarga Sehat) $\geq 0,800$** dari jumlah keluarga yang ada.

Adapun 12 Indikator keluarga sehat adalah :

1. Keluarga mengikuti program KB (keluarga berencana)
2. Ibu hamil memeriksakan kehamilannya (ANC) sesuai standar
3. Bayi mendapatkan Imunisasi lengkap
4. Pemberian ASI eksklusif bayi 0 sd 6 bulan
5. Pemantuan pertumbuhan balita
6. Penderita TB Paru yang berobat sesuai standar
7. Penderita hipertensi yang berobat teratur
8. Penderita gangguan jiwa berat yang diobati
9. Tidak ada anggota keluarga yang merokok
10. Sekeluarga sudah menjadi anggota JKN
11. Mempunyai sarana air bersih
12. Menggunakan jamban keluarga

4.2. Strategi dan Kebijakan

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu-isu strategis yang tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut :

a. Kekuatan

- 1) Pengembangan dan pembinaan tenaga kesehatan,
- 2) Sarana dan prasarana kesehatan yang memadai,
- 3) Kepuasan masyarakat atas pelayanan yang cenderung meningkat setiap tahunnya,
- 4) Dukungan anggaran pemerintah Kabupaten Madiun yang konsisten,
- 5) Sistem pengelolaan alat kesehatan yang terintegrasi.

b. Kelemahan

- 1) Masih adanya kasus kematian ibu, bayi dan anak balita dari tahun ke tahun;
- 2) Lemahnya kesadaran masyarakat untuk ikut menekan munculnya penyakit HIV/AIDS,

c. Peluang

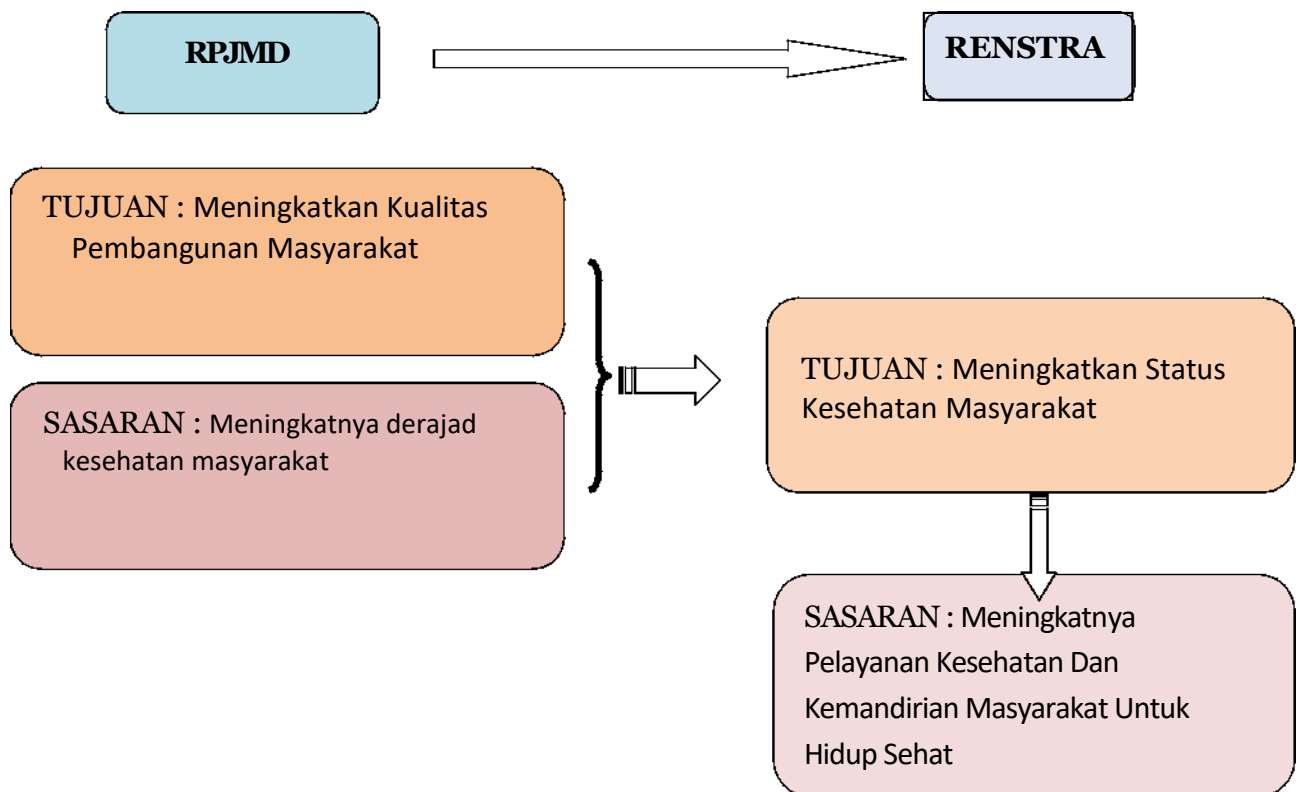
- 1) Adanya tuntutan pendirian Rumah Sakit Umum milik pemerintah,
- 2) Munculnya program keluarga sehat,
- 3) Kepemilikan jaminan kesehatan oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Madiun,
- 4) Kesehatan Lingkungan (ODF).

d. Ancaman/Tantangan

- 1) Masih adanya kasus gizi buruk/stunting,
- 2) Pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular,
- 3) Meningkatnya strata akreditasi fasilitas kesehatan untuk reakreditasi
- 4) Upaya pemenuhan ketersediaan dan kelengkapan perbekalan kesehatan, sarana, dan prasarana yang mendukung pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan
- 5) Ditemukannya jenis vector aedes aegyty dengan virus gen 3 di wilayah Kab. Madiun.
- 6) Penanganan penyakit menular/ tidak menular,
- 7) Adanya deklarasi bebas pasung

Selanjutnya, berdasarkan tujuan, sasaran dan indikator sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun maka dapat dirumuskan strategi dan kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun.

Untuk menerjemahkan visi misi Kepala Daerah, berikut digambarkan keterhubungan RPJMD dengan RENSTRA Dinas Kesehatan sebagai berikut :



Berdasarkan penjabaran tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Kesehatan, maka perlu dipahami sebuah desain yang dapat menggambarkan linieritas antar sasaran Dinas Kesehatan hingga programnya. Berikut dibawah ini disusun Logical Framework yang di golongkan berdasarkan setiap sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun sebagai berikut :

Gambar 4.3. Logical Framework Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun



Gambar 4.4 Cascading Dinas Kesehatan Madiun



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan adalah suatu cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kesehatan. Strategi dan Kebijakan dirumuskan dalam tabel sebagai berikut:

1. Strategi

		PELUANG (OPPORTUNITIES)	ANCAMAN (THREATS)
	FAKTOR EKSTERNAL	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat dan Propinsi untuk pembangunan kesehatan di daerah dengan disediakannya anggaran kesehatan termasuk bagi masyarakat miskin (O1)2. Tersedianya fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta dan mempunyai tenaga yang professional di bidangnya (O2)	<ol style="list-style-type: none">1. Kabupaten merupakan wilayah yang mempunyai zona rawan bencana(T1)2. Pola hidup penularan penyakit yang dipengaruhi oleh globalisasi dan arus informasi(T2)3. Belum optimalnya pemanfaatan posyandu oleh warga masyarakat(T4)4. Terjadinya Pandemi Covid 19 (T5)
	FAKTOR INTERNAL	<ol style="list-style-type: none">1. Komitmen Pemkab yang tinggi dalam pembangunan kesehatan dengan adanya pengorganisasian dan penggerakan Program Program Inovasi melalui SK	<ol style="list-style-type: none">1. Penutupan Lokalisasi(T6)2. Kebijakan Pelaksanaan Akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan (T7)3. Adanya tuntutan masyarakat

		<p>Tim, baik SK Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa /Kelurahan(O3)</p> <p>2. Profesi dan Asosiasi RS, Dinkes dan Klinik (O.01)Kerjasama antara pemerintah kabupaten dengan institusi pendidikan (O5)</p> <p>3. Dukungan Organisasi</p>	<p>terhadap kemudahan akses pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya, dan peningkatan kualitas pelayanan di RSUD(T.05)</p>
--	--	--	--

KEKUATAN (STRENGTHS)	ALTERNATIF STRATEGI (SO)	ALTERNATIF STRATEGI (ST)
<p>1. Terdapat minimal 1 puskesmas di tiap kecamatan (S1)</p> <p>2. Tersedianya sarana prasarana, pedoman, petunjuk teknis dan stándar operasional prosedur (S3)</p> <p>3. Adanya regulasi yang mendukung program kesehatan (S.03)</p> <p>4. Adanya program inovasi kesehatan untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan(S.04)</p> <p>5. Penetapan RSUD menjadi Badan Layanan Umum Daerah sejak Tahun 2018(S.07)</p>	<p>Optimalisasi Koordinasi dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar</p>	<p>Meningkatkan akses dan mutu Pelayanan kesehatan</p>

KELEMAHAN (WEAKNESS)	ALTERNATIF STRATEGI (WO)	ALTERNATIF STRATEGI (WT)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya tenaga kesehatan yang terlatih tata laksana program kesehatan (W1) 2. Perencanaan dan pemanfaatan anggaran di puskesmas belum optimal (W2) 3. Belum optimalnya upaya promotif dan preventif di puskesmas (W3) 4. Beberapa jenis ketenagaan SDM Kesehatan belum terpenuhi jumlahnya di puskesmas dan jaringannya (W4) 5. Capaian indicator rumah tangga ber PHBS masih rendah (47,39%) (W5) 6. Masih adanya kasus gizi buruk(W6) 7. Puskesmas belum memenuhi standar sesuai Permenkes 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas (W7) 	<p>Mengoptimalkan dan sinkronisasi perencanaan dan pemanfaatan anggaran</p>	<p>Mengoptimalkan pelayanan kesehatan menular Covid-19 dan distribusi vaksin di Kabupaten Madiun</p>

SASARAN	INDIKATOR	ALTERNATIF STRATEGI	STRATEGI
Meningkatkan status Kesehatan masyarakat	1. Indeks Keluarga Sehat	1. Optimalisasi Koordinasi dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	1. Meningkatkan akses dan mutu Pelayanan kesehatan
	2. Angka Harapan Hidup	2. Meningkatkan akses dan mutu Pelayanan kesehatan	
		3. Mengoptimalkan dan sinkronisasi perencanaan dan pemanfaatan anggaran	2. Mengoptimalkan pelayanan kesehatan menular Covid-19 dan distribusi vaksin di Kabupaten Madiun
		4. Mengoptimalkan pelayanan kesehatan menular Covid-19 dan distribusi vaksin di Kabupaten Madiun	

KEBIJAKAN

No	Perspektif	Strategi 1: Meningkatkan akses dan mutu Pelayanan kesehatan	
		Kebijakan Umum	Program Pembangunan
1	Perspektif Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan perlindungan pelayanan kesehatan. 2. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan 3. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
2	Perspektif proses Internal		
3	Perspektif Kelembagaan	Peningkatan jaminan akses layanan kesehatan melalui pelaksanaan program- program kesehatan di fasilitas kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
4	Perspektif Keuangan		

No.	Perspektif	Strategi 2: Mengoptimalkan pelayanan kesehatan menular Covid-19 dan distribusi vaksin di Kabupaten Madiun	
		Kebijakan Umum	Program Pembangunan
1	Perspektif Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan tracing/pelacakan rantai penyebaran covid-19 2. Mengoptimalkan pelayanan kesehatan pasien terpapar covid-19 3. Mengoptimalkan distribusi vaksin serta proses vaksinasi Covid-19 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
2	Perspektif proses Internal		
3	Perspektif Kelembagaan		
4	Perspektif Keuangan	Peningkatan pembiayaan kesehatan di Kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Tabel V.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

VISI :Terwujudnya Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera Dan Berakhlak			
MISI 4 : Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
			Pembangunan Puskesmas
			Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
			Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
			Pengadaan Obat, Vaksin
			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya

			Pengelolaan Surveilans Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
			Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
			Operasional Pelayanan Puskesmas
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
			Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
			Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT))
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
			Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
			Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
			Perencanaan Kebutuhan dan Pendetayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
			Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
			Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
			Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
			Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
			Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

BAB VI

PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan. Program-program yang akan dilaksanakan selama periode 2018-2023 adalah sebagai berikut:

Program:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program ini merupakan kegiatan penunjang yang dilaksanakan oleh dinas kesehatan untuk memenuhi kegiatan rutin. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini antara lain:

- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Program ini merupakan program utama yang dilaksanakan di dinas kesehatan yang terdiri dari beberapa kegiatan program dan penyediaan sarana prasarana. Beberapa kegiatan yang diambil dalam program ini antara lain:

- a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- c. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Program ini terkait dengan peningkatan kapasitas dan penyediaan sumberdaya manusia kesehatan. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- a. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
- b. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
- c. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

4. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

Program ini bertujuan untuk memberikan izin dan pengawasan terhadap usaha yang berkaitan di bidang layanan kesehatan, sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
- b. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
- c. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
- d. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

5. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Dalam rangka menyukseskan program kesehatan maka dinas kesehatan harus berkolaborasi dengan masyarakat sebagai subyek dan obyek pelaksana program kesehatan. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat di bidang kesehatan antara lain:

- a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- c. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Rencana Program dan kegiatan tersebut disertai indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatifnya. Program Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun merupakan program prioritas RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023 yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tabel 6.1. Rencana Kerja dan Indikator Bidang Kesehatan

No	Kinerja	Indikator	2021	2022	2023	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Rumah Sakit Rujukan	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	1:1000 Rasio Penduduk	1:1000 Rasio Penduduk	1:1000 Rasio Penduduk	
		Persentase rumah sakit rujukan tingkat Kabupaten/kota yang terakreditasi	90%	90%	90%	
2	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil.	100%	100%	100%	
		2. Pelayanan kesehatan ibu melahirkan.	100%	100%	100%	
		3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	100%	100%	
		4. Pelayanan Kesehatan Balita	100%	100%	100%	
		5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100%	100%	100%	
		6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100%	100%	100%	
		7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia	100%	100%	100%	

No	Kinerja	Indikator	2021	2022	2023	Keterangan
		8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	100%	100%	
		9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100%	100%	100%	
		10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100%	100%	100%	
		11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100%	100%	100%	
		12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	100%	100%	100%	
3	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	205/100.000	205/100.000	205/100.000	
		Penurunan jumlah kematian ibu (AKI) per tahun	15%	15%	15%	
		Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	91%	91%	91%	

No	Kinerja	Indikator	2021	2022	2023	Keterangan
		Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita	18,4%	18,4%	18,4%	
		Prevalensi <i>wasting</i> (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen)	7,5	7,5	7,5	
		Insidensi TB per 100.000 penduduk	231/100.000	231/100.000	231/100.000	
		Insidensi HIV per 1.000 penduduk yang tidak rerinfeksi HIV	0,19	0,19	0,19	
		Temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB)	90%	90%	90%	
		<i>Treatment coverage</i> pada pasien TB	90%	90%	90%	
		Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	71%	71%	71%	
		Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	59%	59%	59%	
		Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	8,9%	8,9%	8,9%	

No	Kinerja	Indikator	2021	2022	2023	Keterangan
		Jumlah Puskesmas melaksanakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)	40%	40%	40%	
		Implementasi KTR pada 9 tempat (pendidikan, transportasi, kesehatan, dll)	90%	90%	90%	
4	Meningkatnya Efektivitas dan Cakupan Pengawasan Perizinan Berusaha Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan	49%	49%	49%	
		Persentase Sarana Produksi UMOT	60%	60%	60%	

Tabel TC 27
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kesehatan
Kabupaten Madiun

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Pelaksana
					2021		2022		2023		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TUJUAN OPD											
Meningkatkan Kualitas Dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan			Indeks Kesehatan	Nilai	0,78		0,8		0,8		
	SASARAN OPD										
	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		Indeks Keluarga Sehat	Nilai	0,2		205		0,21		
			Angka Harapan Hidup	Tahun	71,54		71,7		71,86		
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80,01	88,613,422,559	83,00	89,942,623,897	86,00		
			Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Persen	77		88		90		

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Pelaksana
					2021		2022		2023		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				65,456,434,772		72,002,078,249		79,202,286,073	
			Persentase ketersediaan anggaran gaji dan tunjangan bagi ASN dan Non ASN yang diangkat Pemerintah Kabupaten Madiun di lingkup Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Persen	100%		100%		100%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN dan Non ASN yang diangkat Pemerintah Kabupaten Madiun yang dibayarkan gaji dan tunjangannya di lingkup Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Persen	100%	65,263,934,772	100%	71,790,328,249	100%	78,969,361,073	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase tenaga kesehatan yang menerima insentif pelayanan covid 19	Persen	100%	192,500,000	100%	211,750,000	100%	232,925,000	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dana untuk kebutuhan komponen instalasi listrik, Peralatan kebutuhan kantor, penyediaan barang cetakan dan penyelenggaraan rapat dan konsultasi SKPD yang terpenuhi	Persen	100%	252,638,365	100%	277,902,201	100%	305,692,420	

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Pelaksana
					2021		2022		2023		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis alat listrik yang disediakan dalam pemenuhan kebutuhan kantor	Jenis	8 jenis	18,234,905	9 jenis	20,058,395	8 jenis	22,064,234	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah per jenis alat tulis kantor yang disediakan dalam pemenuhan kebutuhan kantor	jenis	36 jenis	50,000,000	36 jenis	55,000,000	36 jenis	60,500,000	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah per jenis alat rumah tangga yang disediakan dalam pemenuhan kebutuhan kantor	jenis	9 jenis	147,535,630		162,289,193		178,518,112	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan dan kebutuhan penggandaan yang tercukupi dalam pemenuhan kebutuhan kantor	jenis	10 jenis	35,285,145	10 jenis	38,813,659	10 jenis	42,695,024	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan dalam pemenuhan kebutuhan kantor	jenis	20 jenis	217,353,220	20 jenis	239,088,542	20 jenis	262,997,396	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan anggaran untuk jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100%	658,937,386	100%	724,831,124	100%	797,309,236	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan untuk surat menyurat dalam pemenuhan kebutuhan kantor	Buah	165 buah	1,650,000	200 buah	1,815,000	165 buah	1,996,500	

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Pelaksana
					2021		2022		2023		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan waktu operasional jasa telepon, air, listrik dan internet yang tercukupi dalam pemenuhan kebutuhan kantor	Jenis	4 jenis	416,787,386	4 jenis	458,466,124	4 jenis	504,312,736	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah per jenis peralatan dan bahan yang disediakan, serta jumlah kebutuhan waktu layanan jasa keamanan yang tercukupi dalam pemenuhan kebutuhan kantor	Jenis Alat dan orang	8 jenis alat & 68 orang	240,500,000	7 jenis alat & 68 orang	264,550,000	7 jenis alat & 68 orang	291,000,000	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan anggaran Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah untuk dinas kesehatan	Persen	100%	280,781,595	100%	308,859,755	100%	339,745,730	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah paket pemeliharaan kendaraan dinas untuk kebutuhan dinas kesehatan	Paket	37 paket	55,000,000	40 paket	60,500,000	40 paket	66,550,000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor Dinkes dan IFK yang dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan kantor	Paket	5 Paket	55,000,000	5 Paket	60,500,000	5 Paket	66,550,000	

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Pelaksana
					2021		2022		2023		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor (komputer, printer, AC split, mesin ketik, CCTV dan WIFI LAN)	Paket	1 Paket	170,781,595	1 paket	187,859,755	1 paket	206,645,730	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu	per 100 ribu Kelahiran Hidup	0	69,952,806,079	0	71,701,626,231	0		
			Angka Kematian Bayi	Per 1000 lahir hidup	0		0		0		
			Prevalensi Balita Stunting	Persen	15,90		15,25		14,75		
			Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas	Persen	73%		74%		79%		
			Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit	Persen	61		62		63		
			Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	Persen	77		79		81		

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Pelaksana
					2021		2022		2023		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			18,885,353,532		11,527,652,911		11,051,652,910		
			Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia untuk pelayanan UKM dan UKP	Puskesmas	26		26		26		
			Persentase pembangunan puskesmas untuk pelayanan UKM dan UKP	Persen	100%		100%		100%		
			Persentase pembangunan sarana fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendukung pelayanan UKM dan UKP	Persen	100%		100%		100%		
			Persentase Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk pelayanan UKM dan UKP	Persen	100%		100%		100%		
			Persentase pengadaan obat dan vaksin yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan UKM dan UKP	Persen	100%		100%		100%		
			Persentase kegiatan Pemeliharaan dan Kalibrasi peralatan kesehatan untuk pelayanan kesehatan UKM dan UKP	Persen	100%		100%		100%		

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Pelaksana
					2021		2022		2023		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		Pembangunan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang dibangun sesuai dengan prototype		1	6,257,563,600	1	1			
		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase kebutuhan anggaran operasional untuk PMI yang terpenuhi	Persen	100%	750,000,000	100%	750,000,000		750,000,000	
		Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pagar puskesmas yang dibangun / rehab dalam waktu 1 tahun		3	2,452,472,923	3	2,452,472,923		2,452,472,923	
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah jenis alat kesehatan yang diadakan	Jenis	32 Jenis Alat Kesehat an	4,037,018,663	15	2,500,000,000	10	1,500,000,000	
		Pengadaan Obat, Vaksin				5,183,118,359					
			Jumlah jenis obat yang diadakan	Jenis	105	2192221575	110	5,500,000,000	110	6,000,000,000	
			Jumlah jenis bahan habis medis pakai yang diadakan	Jenis	30	449888425	30		30		
			jumlah puskesmas yang mendapatkan distribusi obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar	Puskesmas	26 puskes mas	35000000	26 puskesm as	129524000	26 puskes mas	100000000	

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Pelaksana
					2021		2022		2023		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Jenis Peralatan Kesehatan Kedokteran Terkalibrasi pada Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jenis	14 Jenis Alat Kesehat an	99,230,918	17 Jenis Alat Kesehata n	120,000,000	20 Jenis Alat Keseha tan	144,000,000	
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Jenis Peralatan Kesehatan Kedokteran Terpelihara pada Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jenis	24 Jenis alat Kesehat an	105,949,069	38	205,179,987	38	205,179,987	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standart								
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	100		100		100		
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100		100		100		

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Pelaksana
					2021		2022		2023		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	
			Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	100		100		100		
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	90		91		91,5		
			Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	70		75		80		
			Persentase warga negara usia 60 tahun Keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	19		20		21		
			Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	20		30		40		
			Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	40		50		60		
			Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100		100		100		
			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	50%	39,105,400	70%	125,484,056	80%		

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Pelaksana
					2021		2022		2023		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	72,64%	53,123,260	79,90%	60,428,000	87,89 %		
			Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan	Persen	100		100		100		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Kunjungan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan dasar (K1)	persen	100	43184329	100	101,940,000	100	101,940,000	
			Persentase Kunjungan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan dasar (K4)	persen	100	7524776	100	13,150,000	100	13,150,000	
			Persentase Ibu hamil yang diperiksa HB < 11 gr %	persen	100	71,830,002	100	36,483,865	100	71,830,002	
			Persentase Ibu hamil resiko tinggi yang ditangani	persen	100	173,486,500	100	153,140,000	100	173,486,500	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Presentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standart		100	20,605,869	100	23,460,151	100	23,460,151	
			Persentase persalinan bagi masyarakat yang tidak mampu		100	1528222869	100	398680000	100	398680000	
			Cakupan Ibu nifas mendapat Vitamin A		90	31,491,862	90,1		90,2	34641048	

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Pelaksana
					2021		2022		2023		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Neonatus resiko tinggi yang ditangani		100	0	100		100		
			Persentase Neonatal (0-28 hari) di fasilitas kesehatan dasar (KN 1)		100	0	100	1399860	100	5000000	
			Persentase Neonatal (0-12 bulan i) di fasilitas kesehatan dasar (KN Lengkap)		100	0	100		100		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan posyandu purnama mandiri		81,06		81,8		82	38,071,150	
						3,870,000		38,071,150			
			Cakupan Balita 12-59 bulan mendapat kapsul vitamin A		100%		100%		100%		
			Cakupan Balita 6 - 11 bulan mendapat kapsul vitamin A		100%		100%		100%		
			Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)		100%	0	100%	1432200	100%	5000000	
			Persentase anak usia 12 - 59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart		100	5570000	100	10,987,591	100	12086350	

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Pelaksana
					2021		2022		2023		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar (kelas 1-9) yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standart		90	56,632,696	91	56,632,696	91,5	56,632,696	
			Persentase Anak usia pendidikan lanjut tingkat atas (kelas 10) yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standart		97,7	15535754	97,8	16568410	97,9	16568410	
			Persentase pelayanan kesehatan remaja sesuai standart		65,5		66	13,525,810	66,5	14878391	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Cakupan penduduk usia 14 - 59 tahun yang mendapatkan skrening kesehatan		70	0	75	18,097,971	80	18,097,971	
			Cakupan PUS yang Menjadi Peserta KB Aktif		70%	7,216,950	70%	10,645,629	70%	11710192	
			Cakupan Calon Pengantin yang Mendapat Pelayanan Kesehatan		100%	0	100%	9659477	100%	10000000	
			Cakupan PUS yang Menjadi Peserta KB Baru		10%	0	10%	8888279	10%	9777107	
			Jumlah perempuan umur 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara	orang	16008	104,054,551	16008	0	16008	0	

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Pelaksana
					2021		2022		2023		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapat skrining kesehatan sesuai standart	Persen	19	30,914,179	20	47,860,609	21	52,646,669	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	47768%	2,864,400	30%	55,000,000	40%	60,000,000	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	100%	2,864,400	100%	30,000,000	100%	35,000,000	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Angka keberhasilan pengobatan kasus TBC (Succes Rate)	Persen	90%	777,525,000	92%	850,000,000	95%	875,000,000	
			Persentase pelayanan yg Terduga TBC mendapatkan pelayananTBC sesuai standar	Persen	50%	42,185,400	70%	46,404,000	80	51,044,000	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan sesuai standar	Persen	72,64%	677,640,000	79,90%	680,000,000	87,89 %	685,000,000	

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Pelaksana
					2021		2022		2023		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	
			Persentase penderita HIV mendapatkan pengobatan sesuai standar	Persen	75%	48,923,260	82%	53,815,600	90%	59,197,500	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Presentase pemberian insentif bagi tenaga kesehatan dalam penanganan covid-19	%	100		100		100		
			Persentase Penanganan Covid 19 yang bisa tertangani		100%	770,000,000	100%		100%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Klaim Rujukan dan Penjemputan pasien Covid-19 oleh Petugas Puskesmas	kegiatan	100 %	300,000,000	100%	350,000,000	100%	350,000,000	
			cakupan Pemulasaraan Jenazah Covid-19 yang ditangani		100 %	50,000,000					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif (%)		68,79	9,704,977	69	9,704,977	69,5	10,000,000	

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Pelaksana
					2021		2022		2023		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	
			Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)		100		100	23395680	100	25735248	
			Cakupan Balita ditimbang di Posyandu (D/S) (%)		80,1	2,030,000,000	80,2	67667000	80,3	74433700	
			Cakupan Balita Naik berat badan di Posyandu (N/D) (%)		75		75,5	151239000	76	166362900	
			Cakupan Ibu nifas mendapat Vitamin A (%)		90	5,565,120	90,1	5565120	90,2	6000000	
			Cakupan ibu hamil mendapat Fe 3 (%)		90	431,115,000	90,1	370116000	90,2	407000000	
			Cakupan Balita 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A (%)		90	121,983,694	90,1	109,228,655	90,2	120000000	
			Cakupan remaja putri mendapat TTD		25	10,332,300	26	10332300	27	11000000	
			Cakupan Kecamatan bebas rawan Gizi		83		84		85		
			Cakupan Keluarga berperilaku Sadar Gizi (kadarzi) (%)		90,2		90,3	7678275	90,4	8500000	
			Persentase Rumah Tangga Sehat (10 Indikator)		55,98%	90,075,000	56%	152,059,349	56,05 %	152,059,349	
		KESLING KESJAOR	Jumlah Desa yang melaksanakan Program STBM	Desa	206		206	9,141,566	206	10,055,723	
			Persentase Sarana Air Minum yang dilakukan Pengawasan	Persen	45%		50%	72,063,725	55%	79,270,097	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				67,566,703		50,000,000		5,500,000	

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Pelaksana
					2021		2022		2023		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	
			Persentase Anak Sekolah (SD Kelas 4-6 yang berusia 10-12 Tahun) yang dilakukan Pengukuran Kebugaran Jasmani	Persen	30%	11,177,310	30%	25,000,000	30%	2,525,000	
			Persentase Calon Jemaah Haji yang Diperiksa Kebugarannya	Persen	100%	30,761,703	100%		100%		
			Jumlah Puskesmas yang Terbentuk Pos UKK	Puskesmas	22	25,627,690	26	25,000,000	26	2,525,000	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				526,791,715		182,040,965		200,245,061	
			Jumlah desa yang melaksanakan program kab/kota sehat	Desa	114	0	124	36,352,250	134	39,987,475	
			Jumlah Desa yang melaksanakan Program STBM	Desa	206	10,349,050	206	9,094,600	206	10,004,060	
			Persentase Fasyankes yang Melaksanakan Pengelolaan Limbah Sesuai Peraturan	Persen	75%	432,582,065	85%	129,600,865	100%	142,560,951	
			Persentase Keluarga yang menggunakan Jamban Sehat	Persen	100%	39,705,450	100%	0	100%	0	
			Persentase Sarana Air Minum yang dilakukan Pengawasan	Persen	45%	33,806,100	50%	4,195,950	55%	4,615,545	
			Persentase TPM yang Memenuhi Syarat	Persen	35%	10,349,050	37%	2,797,300	40%	3,077,030	

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Pelaksana
					2021		2022		2023		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			289,517,200		318,468,000		350,315,000		
			Cakupan kelurahan / desa siaga aktif		100 %	48,909,609	100 %	27,195,396	100 %	29,000,000	
			cakupan posyandu purnama dan mandiri		81,6%	72,351,020	81,8%	38,891,445	82%	42,780,500	
			Persentase Rumah Tangga Sehat (10 Indikator)		55,98%	149,866,947	56%	131,042,710	56,05 %	144,146,000	
		KESLING KESJAOR	Jumlah Desa yang melaksanakan Program STBM	Desa	206	55,734,070	206		206		
			Persentase Sarana Air Minum yang dilakukan Pengawasan	Persen	45%	8,885,345	50%		55%		
			Persentase TPM yang Memenuhi Syarat	Persen	35%	10,529,695	37%		40%		
			Persentase Anak Sekolah (SD Kelas 4-6 yang berusia 10-12 Tahun) yang dilakukan Pengukuran Kebugaran Jasmani	Persen	30%	4,389,000	30%	6,170,780	30%	6,787,858	
			Jumlah Puskesmas yang Terbentuk Pos UKK	Puskesmas	22	4,389,000	26	17,488,016	26	19,236,818	
			Persentase Calon Jemaah Haji yang Diperiksa Kebugarannya	Persen	100%		100%	30,175,914	100%	33,193,505	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri,	Persentase pembinaan ke penyehat tradisional		55%	133,118,640	60	155,000,000	65	180,000,000	

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Pelaksana
					2021		2022		2023		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		dan Tradisional Lainnya									
			Persentase penyehat tradisional yg memiliki STPT		40%		45%		50%		
			Persentase puskesmas yg melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar		35%		40%		45%		
			Persentase terbentuknya kelompok Asuhan Mandiri (ASMAN)		15%		20%		25%		
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		95%	195,247,250	85%	214,771,975	85%	236,249,173	
			Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap		93%	125,289,500	93%	132,057,225	93%	145,262,947	
			Cakupan Imunisasi Lanjutan BADUTA		95%	55,000,000	80%	40,000,000	80%	35,000,000	
			Jumlah Penemuan kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) Non Polio		3	0	1	5,000,000	1	10,000,000	
			Persentase kelengkapan pelaporan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)		90%	3,076,550	80%	3,906,000	80%	8,796,600	
			Persentase ketepatan pelaporan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)		80%	3,076,550	80%	3,906,000	80%	4,296,600	
			Persentase KLB di Desa/ Kelurahan yang Ditanggulangi Kurang Dari 24 Jam		100%	5,728,000	100%	22,604,000	100%	24,864,400	

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Pelaksana
					2021		2022		2023		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	
			Persentase Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji		100%	3,076,550	90%	7,298,750	90%	8,028,626	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	orang	1301	31,969,400	1303	51,969,400	1305	65,644,425	
		Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Persentase kejadian bencana yang ditangani	%	88 %	27,000,000	89%	109,780,610	90%	253,251,280	
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				607,194,753		667,014,228		732,814,770	
			Jumlah Fogging Fokus yang dilakukan	Orang	100	407,454,414	150	448,199,855	200	493,019,840	
			Persentase Penderita DBD yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi	%	100	304,537,037	100	282,783,550	100		
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan hepatitis	%	64,87%	39,739,600	70%	43,713,560	80%	48,084,916	
			Penemuan kasus diare balita di sarana kesehatan dan kader di wilayah kerja Puskesmas pada kurun waktu tertentu	%	100	9,228,000	100	10,150,800	100	11,165,000	
			Presentase kasus kusta yang dilakukan PFS secara rutin	%	82%	17,087,400	85%	18,796,140	90%	20,675,754	
			RFT Rate Penderita Kusta	%	100%		100%		100%		

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Pelaksana
					2021		2022		2023		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	
			Persentase penderita malaria mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	20,318,300	100	22,350,130	100	24,585,143	
			Kasus Pneumonia Balita yg ditemukan dan diberikan tatalaksana sesuai stndar di wilayah kerja Puskesmas pada kurun waktu tertentu	%	90%	9,663,400	90%	10,629,740	90%	11,692,714	
			Jumlah perempuan umur 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara		17075	3,000,000	17075	3,000,000	17075	3,000,000	
			Rasio gigi tetap yang ditambal terhadap gigi tetap yang dicabut		>1	3,000,000	>1	3,000,000	>1	3,000,000	
			Prosentase penduduk yang dideteksi dini gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran	%	40%	3,000,000	40%	3,000,000	40%	3,000,000	
			Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	%	93%	94,703,639	93,5%	104,174,003	93,5%	114,591,403	
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan (PBI- D)	Jiwa	42000	20,873,751,379	60000	22,961,126,517	60000	25,257,239,169	
			Persentase pemenuhan biaya klaim pelayanan kesehatan yang belum dijamin oleh PBID	orang	100	116,966,660	100	195,967,200	100	195,967,200	
		Operasional Pelayanan Puskesmas	jumlah dokter kontrak Banprop yang memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas Rawat Inap	Orang	2		2		2		

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Pelaksana
					2021		2022		2023		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	
			Persentase pelayanan vaksinasi Covid 19	%	100%	4,385,448,400	100%	4,823,993,240	100%	5,306,392,564	
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumah perawat ponkesdes memberikan pelayanan kesehatan	Orang	40		40		40		
			Persentase pelayanan vaksinasi Covid 19		100%	1,233,254,380	100%	1,356,579,818	100%	1,492,237,800	
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas terakreditasi	Puskesmas	26	1,690,390,000	5	248,131,000	21	1,690,390,000	
		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT))	Persentase pemenuhan peralatan sistem SPGDT dalam rangka kegiatan PSC 119		0	0	100%	500,000,000	100%	500,000,000	
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				735,898,500		809,488,350		879,112,800	
			Persentase ketersediaan pelayanan kegawatdaruratan,	%	100	265,000,000	100	291,500,000	100	320,650,000	

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Pelaksana
					2021		2022		2023		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	
			Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan pengobatan massal	%	-	-	-	-	-	-	
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	jumlah Puskesmas yang bekerjasama dengan BPJS,	Puskesmas	26		26		26		
			Jumlah Puskesmas yang terakreditasi,	Puskesmas	26	205,898,500	26	105,898,500	26	237,812,800	
			Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah yang memberikan pelayanan UKM dan UKP	Puskesmas	26						
		Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah anak yang mendapatkan pelayanan khitan massal	anak	-	-	150 anak	124,730,400	150 anak	136,078,440	
			Presentasi RS yang terakreditasi		-	-	-		100%		
			Persentase Ketersediaan posko kegawatdaruratan	%	100%	265,000,000	100%	291,500,000	100%	320,650,000	
			Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan pengobatan massal,	-	93%	-	94%		94%		
			Presentasi Pelayanan Kesehatan Rujukan	%	19%		20%		21%		

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Pelaksana
					2021		2022		2023		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar kompetensi		100	293,829,505	100	301,175,243	100		
			Persentase peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan		100		100		100		
		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota				22,676,250		28,000,000		27,438,263	
			Prosentase tenaga kesehatan yang mendapatkan izin praktek		100%		100%		100%		
			Prosentase sarana kesehatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan praktek tenaga kesehatan		20%		20%		20%		
		Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan ijin praktek	Tenaga Kesehatan	116	22,676,250	120	28,000,000		27,438,263	

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Pelaksana
					2021		2022		2023		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	
			Jumlah sarana kesehatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan praktek tenaga kesehatan	Sarana Kesehatan	91		91		91		
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				2,304,712,000		2,404,712,000		2,514,712,000	
			Prosentase tenaga kesehatan Non ASN yang mendapatkan insentif tenaga kesehatan dalam rangka penanganan Covid-19	%	100		100		100		
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Persentase tenaga kesehatan Non ASN yang mendapatkan insentif tenaga kesehatan dalam rangka penanganan Covid-19	%	100	1,000,000,000		1,100,000,000		1,210,000,000	
			Jumlah perawat ponkesdes dan dokter puskesmas rawat inap standar yang mendapat honor dari Provinsi		42	1,101,541,862	42	1,101,541,862	42	1,101,541,862	

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Pelaksana
					2021		2022		2023		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			320,053,255		347,250,000		464,944,979		
			Prosentase tenaga kesehatan yang lulus uji kompetensi	%	96,6		96,6		96,6		
			Prosentase tenaga kesehatan yang penilaian angka kreditnya memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang	%	82,2		82,2		82,2		
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang lulus uji kompetensi		29	37,144,611		37,223,300		44,944,979	
			Jumlah Petugas Pengelola Kefarmasian yang memperoleh bimtek Standart Kefarmasian		171	47,716,000	150	15,000,000	180	70,000,000	

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Pelaksana
					2021		2022		2023		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	
			Jumlah Petugas Pengelola Keamanan Pangan yang memperoleh bimtek Keamanan Pangan		57	148,500,000	0	0	0	0	
			Jumlah tenaga kesehatan yang penilaian angka kreditnya memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang		88	17,093,144	88	13,776,700	88	70,000,000	
			Jumlah SDM Kesehatan yang diusulkan melalui perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan (Renbut)		501	9,975,750	501	10,000,000	501	70,000,000	
			Jumlah sarana kesehatan yang data SDM terupdate di aplikasi SI-SDMK		173	8,127,750	173	22,595,600	173	70,000,000	
			Jumlah dokter yang mengikuti Program Internsip Dokter Indonesia		9	2,596,000	9	2,864,400	9	70,000,000	
			Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti Diklat Tenaga Kesehatan				6	30,000,000			
			Persentase pelayanan vaksinasi Covid 19		100%	48,900,000	100%	53,790,000	100%	70,000,000	
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana kefarmasian, toko alat kesehatan, industri kecil makanan dan minuman yang memenuhi standar		80	233,839,200	80	239,685,180	85		

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Pelaksana
					2021		2022		2023		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			40,820,000		40,820,000		20,410,000		
			Prosentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional yang berijin		100%	20,410,000	100%	20,410,000	100%		
		Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Data Apotek yang berijin		77 Apotek	20,410,000	70	17,600,000	80	20,410,000	
			Jumlah Data Toko Obat yang berijin		5 Toko Obat		5		5 Toko Obat		
			Jumlah Data Toko Alat Kesehatan yang berijin		2 Toko Alat Kesehatan		4 Toko Alat Kesehatan	2,400,000	4 Toko Alat Kesehatan	2,400,000	
			Jumlah Data Optikal yang berijin		3 Optikal		3 Optikal		3 Optika		

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Pelaksana
					2021		2022		2023		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Prosentase Produsen PKRT yang Berijin sesuai PERMENKES		100%	-	100%	10,000,000	100%	15,000,000	
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Hasil Produksi PKRT yang sesuai dengan Standart		2 Produk	-	2 Produk	10,000,000	2 Produk	15,000,000	
			Jumlah Produsen PKRT yang Berijin sesuai PERMENKES		1 Produsen		2 Produsen		2 Produsen		

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Pelaksana
					2021		2022		2023		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			223,490,000		242,780,000		250,000,000		
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Pemohon Produsen Industri Rumah Tangga Pangan yang diterbitkan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (%)		100	111,745,000	100	214,690,000	100	235,000,000	

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Pelaksana
					2021		2022		2023		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	
			Jumlah Pemohon Produsen Industri Rumah Tangga Pangan yang mengikuti Bimtek Penyuluhan Keamanan Pangan		200	83,424,200	260	171,140,000	260	180,000,000	
			Jumlah Pemohon Produsen Industri Rumah Tangga Pangan yang telah diperiksa sarana dan terbit sertifikat PIRT		200	26,102,400	260	41,050,000	260	50,000,000	
			Jumlah Kegiatan Pengkajian Sertifikasi Produksi		1	2,218,400	4	2,500,000	4	5,000,000	
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga				194,963,200		214,304,000		214,304,000	
			Presentase Sampel makanan Industri Rumah Tangga Pangan yang diuji laboratorium yang memenuhi syarat		62	101,684,200	70	107,152,000	70	107,152,000	

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Pelaksana
					2021		2022		2023		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	jumlah pengawasan sarana Industri rumah tangga pangan		77 11,500,000	48 24,090,000	48 24,090,000	48 24,090,000			
			jumlah pengawasan produk pangan industri rumah tangga		62 81,779,000	60 83,062,000	60 83,062,000	60 83,062,000			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri		19,6% 83,062,000	19,80% 2,370,797,120	20				
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri		19,6% 394,356,800	19,8% 374,363,000	20%	391,465,900			
			Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri								

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Pelaksana
					2021		2022		2023		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	
			Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri		19,6%	31,514,692	19,8%	31,474,971	20%	34,000,000	
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Poskestren Yang dilakukan pendampingan		10	89,514,308	10	89,554,029	10	98,509,430	
			Cakupan Taman Posyandu Optimal		10%		15%		18%		
			Jumlah sasaran yang mengikuti KIE		360	113,727,800	300	178,334,000	300	178,334,000	
			Jumlah petugas kesehatan yang memberikan konseling		40	89,600,000	38	89600000	38	89600000	
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan promotif dan preventif yang dilaksanakan sesuai perencanaan		100	0		0		0	
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Presentase kegiatan BOK UKM Kabupaten Berjalan lancar		100						
			Presentase kegiatan promotif dan preventif yang dilaksanakan								

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Pelaksana
					2021		2022		2023		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Poskestren yang dilakukan pendampingan	%	100	191,029,000		196,029,000		213,131,900	
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Poskestren Yang dilakukan pendampingan		10	121,029,000	10	121,029,000	10	133,131,900	
			Cakupan Taman Posyandu Optimal		10%		15%		18%	80,000,000	
		Hygiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						18,254,590		20,080,049	
			Persentase DAM yang Memenuhi Syarat	Persen			56%	9,127,449	60%	10,040,194	
			Persentase TPM yang Memenuhi Syarat	Persen			37%	9,127,141	40%	10,039,855	

Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Pelaksana
					2021		2022		2023		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan					18,254,590		20,080,049		
			Prosentase Tempat Pengelolaan makanan jajanan dan sentra makanan jajanan yang mendapatkan stiker pembinaan	Persen			6%	7,000,000	10%	7,700,000	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KESEHATAN

Indikator kinerja Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat Kabupaten Madiun berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat Kabupaten Madiun untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat Kabupaten Madiun telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD

Rencana Kegiatan, Indikator dan Anggaran

Visi	Terwujudnya Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera Dan Berakhlak
Misi	Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan
Tujuan	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Masyarakat
Indikator Tujuan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Sasaran	Meningkatnya Kualitas Dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan
Indikator Sasaran	Usia Harapan Hidup

VI. 1.Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan

No	IKU	Formula Perhitungan	Kondisi kinerja pada awal	Target					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
			Tahun-0 2018	Tahun-1 2019	Tahun-2 2020	Tahun-3 2021	Tahun-4 2022	Tahun-5 2023	
	Indeks Keluarga Sehat		0.185%	0.190 %	0.195 %	0.200 %	0.205 %	0.210 %	0.210 %
	Prosentase Keluarga Sehat	$\frac{\text{Jumlah Keluarga sehat}}{\text{Jumlah Keluarga Yang di survei}} \times 100 \%$	17.90	18.40	18.90	19.40	19.90	20.40	20.40

VI.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan

No	IKU	Formula Perhitungan	Kondisi kinerja pada awal periode Renstra	Target					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
			Tahun-0 2018	Tahun-1 2019	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	
1	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	$\frac{\text{Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama}} \times 100.000$	151.47	21.93	0	0	0	0	0
2	Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	$\frac{\text{Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama}} \times 1.000$	6.38	1.86	0	0	0	0	0
3	Prevalensi Stunting pada Balita	$\frac{\text{Jumlah balita stunting}}{\text{Jumlah seluruh balita yang ditimbang}} \times 100 \%$	20.70	206.00	20.50	20.40	20.30	20.20	20.10
4	Persentase pelayanan Penderita penyakit menular dan tidak menular sesuai standar (%)	$\frac{\text{Jumlah Penderita yang di obati sesuai dengan standar dalam wilayah kabupaten dalam kurun waktu 1 tahun}}{\text{Jumlah semua penderita yang ditemukan dalam wilayah kabupaten dalam kurun waktu 1 tahun}} \times 100 \%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	IKU	Formula Perhitungan	Kondisi kinerja pada awal periode Renstra	Target					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
			Tahun-0 2018	Tahun-1 2019	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	
5	Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) di desa/kelurahan yang ditanggulangi < 24 jam	$\frac{\text{Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) di desa/kelurahan yang ditanggulangi < 24 jam pada periode waktu tertentu}}{\text{Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) yang terjadi pada wilayah desa/kelurahan pada periode waktu yang sama}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah kunjungan baru dan lama baik pelayanan dalam dan luar gedung, disemua fasilitas kesehatan}}{\text{Jumlah penduduk di tahun tertentu}} \times 100\%$	76,8%	77%	79%	81%	83%	85%	76,8%
7	Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) yang terakreditasi dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah Seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) dalam kurun waktu yang sama}} \times 100\%$	37,8%	45%	60%	70%	80%	100%	37,8%
8	Prosentase sumber daya manusia kesehatan tertentu yang memenuhi standar kompetensi	$\frac{\text{Jumlah sumber daya manusia kesehatan tertentu yang memenuhi standar kompetensi}}{\text{Jumlah sumber daya mengikuti kompetensi}} \times 100\%$	50.67	100%	100%	100%	100%	100.00	50.67
9	Persentase sarana kesehatan yang memenuhi komitmen	$\frac{\text{Jumlah sarana kesehatan yang memenuhi komitmen}}{\text{Jumlah sarana kesehatan yang mengajukan}} \times 100\%$	87.00	100%	100%	100%	100%	100%	87.00

No	IKU	Formula Perhitungan	Kondisi kinerja pada awal periode Renstra	Target					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
			Tahun-0 2018	Tahun-1 2019	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	
10	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	$\frac{\text{Jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang disediakan}}{\text{Jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang dibutuhkan}} \times 100\%$	68.97	100%	100%	100%	100%	100.00	68.97
11	Persentase produk alkes dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat	$\frac{\text{Jumlah produk alkes dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat}}{\text{Jumlah produk alkes dan PKRT ada di peredaran}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100.00	100%
12	Cakupan masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas BLUD	$\frac{\text{Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan}}{\text{Jumlah masyarakat yang ada di wilayah Puskesmas}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Prosentase kegiatan bantuan operasional kesehatan pada puskesmas	$\frac{\text{Jumlah Puskesmas yang mendapat bantuan operasional kesehatan}}{\text{Jumlah Puskesmas yang ada pada tahun yang sama}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Persentase puskesmas yang memberikan pelayanan JKN sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan JKN sesuai standar}}{\text{Jumlah Puskesmas yang ada pada tahun yang sama}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel TC 28

Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian 2020	Target Capaian Setiap tahun			Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Kesehatan	0,79	0,78	0,8	0,8	0,8
2	Indeks Keluarga Sehat		0,2	0,205	0,21	0,21
3	Angka Harapan Hidup	71,38	71,54	71,7	71,86	71,86
4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,41	80,01	83,00	86,00	86,00
5	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah		77	88	90	90
6	Persentase ketersediaan anggaran gaji dan tunjangan bagi ASN dan Non ASN yang diangkat Pemerintah Kabupaten Madiun di lingkup Dinas Kesehatan dan Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase ASN dan Non ASN yang diangkat Pemerintah Kabupaten Madiun yang dibayarkan gaji dan tunjangannya di lingkup Dinas Kesehatan dan Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase tenaga kesehatan yang menerima insentif pelayanan covid 19	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase ketersediaan dana untuk kebutuhan komponen instalasi listrik, Peralatan kebutuhan kantor, penyediaan barang cetakan dan penyelenggaraan rapat dan konsultasi SKPD yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%
10	Jumlah jenis alat listrik yang disediakan dalam pemenuhan kebutuhan kantor	8 jenis	8 jenis	9 jenis	8 jenis	8 jenis

No	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian 2020	Target Capaian Setiap tahun			Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	
11	Jumlah per jenis alat tulis kantor yang disediakan dalam pemenuhan kebutuhan kantor	36 jenis	36 jenis	36 jenis	36 jenis	36 jenis
12	Jumlah per jenis alat rumah tangga yang disediakan dalam pemenuhan kebutuhan kantor	9 jenis	9 jenis			
13	Jumlah barang cetakan yang disediakan dan kebutuhan penggandaan yang tercukupi dalam pemenuhan kebutuhan kantor	10 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis
14	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan dalam pemenuhan kebutuhan kantor	20 jenis	20 jenis	20 jenis	20 jenis	20 jenis
15	Persentase pemenuhan anggaran untuk jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%
16	Jumlah materai yang disediakan untuk surat menyurat dalam pemenuhan kebutuhan kantor	165 buah	165 buah	200 buah	165 buah	165 buah
17	Jumlah kebutuhan waktu operasional jasa telepon, air, listrik dan internet yang tercukupi dalam pemenuhan kebutuhan kantor	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis
18	Jumlah per jenis peralatan dan bahan yang disediakan, serta jumlah kebutuhan waktu layanan jasa keamanan yang tercukupi dalam pemenuhan kebutuhan kantor	7 jenis alat & 68 orang	7 jenis alat & 68 orang	7 jenis alat & 68 orang	7 jenis alat & 68 orang	7 jenis alat & 68 orang
19	Persentase ketersediaan anggaran Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah untuk dinas kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%
20	Jumlah paket pemeliharaan kendaraan dinas untuk kebutuhan dinas kesehatan	37 paket	37 paket	40 paket	40 paket	40 paket
21	Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor Dinkes dan IFK yang dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan kantor	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket
22	Jumlah paket pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor (komputer, printer, AC split, mesin ketik, CCTV dan WIFI LAN)	1 Paket	1 Paket	1 paket	1 paket	1 paket

No	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian 2020	Target Capaian Setiap tahun			Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	
23	Angka Kematian Ibu	173,39	0	0	0	0
24	Angka Kematian Bayi	7,28	0	0	0	0
25	Prevalensi Balita Stunting	16,96	15,90	15,25	14,75	14,75
26	Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan	73%	73%	74%	79%	79%
27	Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan	61	61	62	63	63
28	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	77	77	79	81	81
29	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia untuk pelayanan UKM dan UKP	26	26	26	26	26
30	Persentase pembangunan puskesmas untuk pelayanan UKM dan UKP	100%	100%	100%	100%	100%
31	Persentase pembangunan sarana fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendukung pelayanan UKM dan UKP	100%	100%	100%	100%	100%
32	Persentase Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk pelayanan UKM dan UKP	100%	100%	100%	100%	100%
33	Persentase pengadaan obat dan vaksin yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan UKM dan UKP	100%	100%	100%	100%	100%
34	Persentase kegiatan Pemeliharaan dan Kalibrasi peralatan kesehatan untuk pelayanan kesehatan UKM dan UKP	100%	100%	100%	100%	100%
35	Jumlah puskesmas yang dibangun sesuai dengan prototype	1	1	1	1	1
36	Persentase kebutuhan anggaran operasional untuk PMI yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%
37	Jumlah pagar puskesmas yang dibangun / rehab dalam waktu 1 tahun	3	3	3	3	3
38	Jumlah jenis alat kesehatan yang diadakan	32 Jenis Alat Kesehatan	32 Jenis Alat Kesehatan	15 Jenis Alat Kesehatan	10 Jenis Alat Kesehatan	10 Jenis Alat Kesehatan

No	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian 2020	Target Capaian Setiap tahun			Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	
39	Jumlah jenis obat yang diadakan	105	105	110	110	110
40	Jumlah jenis bahan habis medis pakai yang diadakan	30	30	30	30	30
41	jumlah puskesmas yang mendapatkan distribusi obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar	26 puskesmas	26 puskesmas	26 puskesmas	26 puskesmas	26 puskesmas
42	Jumlah Jenis Peralatan Kesehatan Kedokteran Terkalibrasi pada Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	14 Jenis Alat Kesehatan	14 Jenis Alat Kesehatan	17 Jenis Alat Kesehatan	20 Jenis Alat Kesehatan	20 Jenis Alat Kesehatan
43	Jumlah Jenis Peralatan Kesehatan Kedokteran Terpelihara pada Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	24 Jenis alat Kesehatan	24 Jenis alat Kesehatan	38 Jenis alat Kesehatan	38 Jenis alat Kesehatan	38 Jenis alat Kesehatan
44	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standart	96,56	100%	100%	100%	100%
45	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	92,72	100%	100%	100%	100%
46	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	97,30	100%	100%	100%	100%
47	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	70,63	100%	100%	100%	100%
48	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	90	100%	100%	100%	100%
49	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	66,65	100%	100%	100%	100%
50	Persentase warga negara usia 60 tahun Keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	19	100%	100%	100%	100%
51	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10,04	100%	100%	100%	100%
52	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	31,66	100%	100%	100%	100%
53	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	97,23	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian 2020	Target Capaian Setiap tahun			Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	
54	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	35,90	100%	100%	100%	100%
55	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	66,04%	100%	100%	100%	100%
56	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%
57	Persentase Kunjungan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan dasar (K1)	97%	98%	99%	100%	100%
58	Persentase Kunjungan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan dasar (K4)	90%	91%	92%	93	93
59	Persentase Ibu hamil yang diperiksa HB < 11 gr %	100%	100%	100%	100%	100%
60	Persentase Ibu hamil resiko tinggi yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%
61	Presentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standart	92,72%	100%	100%	100%	100%
62	Persentase persalinan bagi masyarakat yang tidak mampu	100%	100%	100%	100%	100%
63	Cakupan Ibu nifas mendapat Vitamin A	90,1%	90%	90,1%	90,2%	90,2%
64	Persentase Neonatus resiko tinggi yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%
65	Persentase Neonatal (0-28 hari) di fasilitas kesehatan dasar (KN 1)	100%	100%	100%	100%	100%
66	Persentase Neonatal (0-12 bulan i) di fasilitas kesehatan dasar (KN Lengkap)	100%	100%	100%	100%	100%
67	Cakupan posyandu purnama mandiri	81,4	81,06	81,8	82	82
68	Cakupan Balita 12-59 bulan mendapat kapsul vitamin A	100%	100%	100%	100%	100%
69	Cakupan Balita 6 - 11 bulan mendapat kapsul vitamin A	100%	100%	100%	100%	100%
70	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian 2020	Target Capaian Setiap tahun			Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	
71	Persentase anak usia 12 - 59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart	100%	100%	100%	100%	100%
72	Persentase anak usia pendidikan dasar (kelas 1-9) yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standart	90%	90%	91%	91,5%	91,5%
73	Persentase Anak usia pendidikan lanjut tingkat atas (kelas 10) yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standart	97,60%	97,7%	97,8%	97,9%	97,9%
74	Persentase pelayanan kesehatan remaja sesuai standart	65%	65,5%	66%	66,5%	66,5%
75	Cakupan penduduk usia 14 - 59 tahun yang mendapatkan skrening kesehatan	70%	70%	75%	80%	80%
76	Cakupan PUS yang Menjadi Peserta KB Aktif	76,10	70%	70%	70%	70%
77	Cakupan Calon Pengantin yang Mendapat Pelayanan Kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%
78	Cakupan PUS yang Menjadi Peserta KB Baru	10%	10%	10%	10%	10%
79	Jumlah perempuan umur 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara		16008	16008	16008	16008
80	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapat skrining kesehatan sesuai standart	19%	19%	20%	21%	21%
81	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10,04%	100%	100%	100%	100%
82	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	31,66%	100%	100%	100%	100%
83	Angka keberhasilan pengobatan kasus TBC (Succes Rate)	87,50%	90%	92%	95%	95%
84	Persentase pelayanan yg Terduga TBC mendapatkan pelayananTBC sesuai standar	42,13%	100%	100%	100%	100%
85	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan sesuai standar	66,04%	100%	100%	100%	100%
86	Persentase penderita HIV mendapatkan pengobatan sesuai standar	68%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian 2020	Target Capaian Setiap tahun			Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	
87	Presentase pemberian insentif bagi tenaga kesehatan dalam penanganan covid-19	100%	100%	100%	100%	100%
88	Persentase Penanganan Covid 19 yang bisa tertangani	100%	100%	100%	100%	100%
89	Jumlah Klaim Rujukan dan Penjemputan pasien Covid-19 oleh Petugas Puskesmas	100%	100 %	100%	100%	100%
90	cakupan Pemulasaraan Jenazah Covid-19 yang ditangani	100%	100 %	100%	100%	100%
91	Cakupan bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif (%)	68,50%	68,79	69	69,5	69,5
92	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100%	100	100	100	100
93	Cakupan Balita ditimbang di Posyandu (D/S) (%)	80,1	80,1	80,2	80,3	80,3
94	Cakupan Balita Naik berat badan di Posyandu (N/D) (%)	74,5	75	75,5	76	76
95	Cakupan Ibu nifas mendapat Vitamin A (%)	90,1%	90%	90,1%	90,2%	90,2%
96	Cakupan ibu hamil mendapat Fe 3 (%)	90,1%	90%	90,1%	90,2%	90,2%
97	Cakupan Balita 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A (%)	91,6%	90%	90,1%	90,2%	90,2%
98	Cakupan remaja putri mendapat TTD	25%	25%	26%	27%	27%
99	Cakupan Kecamatan bebas rawan Gizi	83%	83%	84%	85%	85%
100	Cakupan Keluarga berperilaku Sadar Gizi (kadarzi) (%)	90,2%	90,2%	90,3%	90,4%	90,4%
101	Persentase Rumah Tangga Sehat (10 Indikator)	55,94	55,98%	56%	56,05%	56,05%
102	Jumlah Desa yang melaksanakan Program STBM	201	206	206	206	206
103	Persentase Sarana Air Minum yang dilakukan Pengawasan	40%	45%	50%	55%	55%
104	Persentase Anak Sekolah (SD Kelas 4-6 yang berusia 10-12 Tahun) yang dilakukan Pengukuran Kebugaran Jasmani	25%	30%	30%	30%	30%
105	Persentase Calon Jemaah Haji yang Diperiksa Kebugarannya	0	100%	100%	100%	100%
106	Jumlah Puskesmas yang Terbentuk Pos UKK	22	22	26	26	26

No	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian 2020	Target Capaian Setiap tahun			Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	
107	Jumlah desa yang melaksanakan program kab/kota sehat	125	114	124	134	134
108	Jumlah Desa yang melaksanakan Program STBM	201	206	206	206	206
109	Persentase Fasyankes yang Melaksanakan Pengelolaan Limbah Sesuai Peraturan	60%	75%	85%	100%	100%
110	Persentase Keluarga yang menggunakan Jamban Sehat	97%	100%	100%	100%	100%
111	Persentase Sarana Air Minum yang dilakukan Pengawasan	40%	45%	50%	55%	55%
112	Persentase TPM yang Memenuhi Syarat	32%	35%	37%	40%	40%
113	Cakupan kelurahan / desa siaga aktif	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
114	cakupan posyandu purnama dan mandiri	81,4%	81,6%	81,8%	82%	82%
115	Persentase Rumah Tangga Sehat (10 Indikator)	55,95%	55,98%	56%	56,05%	56,05%
116	Jumlah Desa yang melaksanakan Program STBM	201	206	206	206	206
117	Persentase Sarana Air Minum yang dilakukan Pengawasan	40%	45%	50%	55%	55%
118	Persentase TPM yang Memenuhi Syarat	32%	35%	37%	40%	40%
119	Persentase Anak Sekolah (SD Kelas 4-6 yang berusia 10-12 Tahun) yang dilakukan Pengukuran Kebugaran Jasmani	25%	30%	30%	30%	30%
120	Jumlah Puskesmas yang Terbentuk Pos UKK	22	22	26	26	26
121	Persentase Calon Jemaah Haji yang Diperiksa Kebugarannya	0	100%	100%	100%	100%
122	Persentase pembinaan ke penyehat tradisional	10,51%	55%	60%	65%	65%
123	Persentase penyehat tradisional yg memiliki STPT	8,47%	40%	45%	50%	50%
124	Persentase puskesmas yg melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar	92%	70%	75%	80%	80%
125	Persentase terbentuknya kelompok Asuhan Mandiri (ASMAN)	57%	60%	65%	70%	70%
126	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	83,1%	95%	85%	85%	85%

No	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian 2020	Target Capaian Setiap tahun			Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	
127	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	94,86%	93%	93%	93%	93%
128	Cakupan Imunisasi Lanjutan BADUTA	84,78%	95%	80%	80%	80%
129	Jumlah Penemuan kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) Non Polio	1	3	1	1	1
130	Persentase kelengkapan pelaporan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)	90%	90%	80%	80%	80%
131	Persentase ketepatan pelaporan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)	80%	80%	80%	80%	80%
132	Persentase KLB di Desa/Kelurahan yang Ditanggulangi Kurang Dari 24 Jam	100%	100%	100%	100%	100%
133	Persentase Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji	100%	100%	90%	90%	90%
134	Jumlah ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	92%	100%	100%	100%	100%
135	Persentase kejadian bencana yang ditangani	100%	88 %	89%	90%	90%
136	Jumlah Fogging Fokus yang dilakukan	100 Fokus	100 Fokus	150 Fokus	200 Fokus	200 Fokus
137	Persentase Penderita DBD yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi	100%	100%	100%	100%	100%
138	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan hepatitis	100%	100%	100%	100%	100%
139	Penemuan kasus diare balita di sarana kesehatan dan kader di wilayah kerja Puskesmas pada kurun waktu tertentu	100%	100%	100%	100%	100%
140	Presentase kasus kusta yang dilakukan PFS secara rutin	82%	82%	85%	90%	90%
141	RFT Rate Penderita Kusta	100%	100%	100%	100%	100%
142	Persentase penderita malaria mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian 2020	Target Capaian Setiap tahun			Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	
143	Kasus Pneumonia Balita yg ditemukan dan diberikan tatalaksana sesuai standar di wilayah kerja Puskesmas pada kurun waktu tertentu	100%	100%	100%	100%	100%
144	Jumlah perempuan umur 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara		17075	17075	17075	17075
145	Rasio gigi tetap yang ditambal terhadap gigi tetap yang dicabut	>1	>1	>1	>1	>1
146	Persentase penduduk yang dideteksi dini gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran	6%	40%	40%	40%	40%
147	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	94,86%	93%	93,5%	93,5%	93,5%
148	Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan (PBI- D)	41331	42000	45000	45000	45000
149	Persentase pemenuhan biaya klaim pelayanan kesehatan yang belum dijamin oleh PBID	100%	100%	100%	100%	100%
150	jumlah dokter kontrak Banprop yang memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas Rawat Inap	2	2	2	2	2
151	Persentase pelayanan vaksinasi Covid 19	100%	100%	100%	100%	100%
152	Jumlah perawat puskesmas memberikan pelayanan kesehatan	40	40	40	40	40
153	Persentase pelayanan vaksinasi Covid 19	100%	100%	100%	100%	100%
154	Jumlah Puskesmas terakreditasi	26	26	26	26	26
155	Persentase pemenuhan peralatan sistem SPGDT dalam rangka kegiatan PSC 119	0	0	100%	100%	100%
156	Persentase ketersediaan pelayanan kegawatdaruratan,	100%	100%	100%	100%	100%
157	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan pengobatan massal		-	100%	100%	100%
158	jumlah Puskesmas yang bekerjasama dengan BPJS,	26	26	26	26	26

No	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian 2020	Target Capaian Setiap tahun			Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	
159	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi,	26	26	26	26	26
160	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah yang memberikan pelayanan UKM dan UKP	26	26	26	26	26
161	Jumlah anak yang mendapatkan pelayanan khitan massal		-	150 anak	150 anak	150 anak
162	Presentasi RS yang terakreditasi	100%	100%	100%	100%	100%
163	Persentase Ketersediaan posko kegawatdaruratan	100%	100%	100%	100%	100%
164	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan pengobatan massal,	0	93%	94%	94%	94%
165	Presentase Pelayanan Kesehatan Rujukan	18,26%	19%	20%	21%	21%
166	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%
167	Persentase peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%
168	Prosentase tenaga kesehatan yang mendapatkan izin praktek	100%	100%	100%	100%	100%
169	Prosentase sarana kesehatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan praktek tenaga kesehatan	0	20%	20%	20%	
170	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan ijin praktek		116	120		
171	Jumlah sarana kesehatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan praktek tenaga kesehatan		91	91	91	
172	Prosentase tenaga kesehatan Non ASN yang mendapatkan insentif tenaga kesehatan dalam rangka penanganan Covid-19	100%	100%	100%	100%	100%
173	Persentase tenaga kesehatan Non ASN yang mendapatkan insentif tenaga kesehatan dalam rangka penanganan Covid-19	100%	100%	100%	100%	100%
174	Jumlah perawat ponkesdes dan dokter puskesmas rawat inap standar yang mendapat honor dari Provinsi	42	42	42	42	42

No	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian 2020	Target Capaian Setiap tahun			Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	
175	Prosentase tenaga kesehatan yang lulus uji kompetensi		96,6	96,6	96,6	96,6
176	Prosentase tenaga kesehatan yang penilaian angka kreditnya memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang		82,2	82,2	82,2	82,2
177	Jumlah tenaga kesehatan yang lulus uji kompetensi		29			
178	Jumlah Petugas Pengelola Kefarmasian yang memperoleh bimtek Standart Kefarmasian		171	150	180	180
179	Jumlah Petugas Pengelola Keamanan Pangan yang memperoleh bimtek Keamanan Pangan		57	0	0	0
180	Jumlah tenaga kesehatan yang penilaian angka kreditnya memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang		88	88	88	88
181	Jumlah SDM Kesehatan yang diusulkan melalui perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan (Renbut)		501	501	501	501
182	Jumlah sarana kesehatan yang data SDMK terupdate di aplikasi SI-SDMK		173	173	173	173
183	Jumlah dokter yang mengikuti Program Internsip Dokter Indonesia		9	9	9	
184	Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti Diklat Tenaga Kesehatan			6		
185	Persentase pelayanan vaksinasi Covid 19	100%	100%	100%	100%	100%
186	Persentase sarana kefarmasian, toko alat kesehatan, industri kecil makanan dan minuman yang memenuhi standar		80%	80%	85%	85%
187	Prosentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional yang berijin		100%	100%	100%	100%
188	Jumlah Data Apotek yang berijin	77 Apotek	77 Apotek	70 Apotek	80 Apotek	80 Apotek
189	Jumlah Data Toko Obat yang berijin	5 Toko Obat	5 Toko Obat	5	5 Toko Obat	5 Toko Obat
190	Jumlah Data Toko Alat Kesehatan yang berijin	2 Toko Alat Kesehatan	2 Toko Alat Kesehatan	4 Toko Alat Kesehatan	4 Toko Alat Kesehatan	4 Toko Alat Kesehatan

No	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian 2020	Target Capaian Setiap tahun			Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	
191	Jumlah Data Optikal yang berijin	3 Optikal	3 Optikal	3 Optikal	3 Optikal	3 Optikal
192	Prosentase Produsen PKRT yang Berijin sesuai PERMENKES		100%	100%	100%	100%
193	Jumlah Hasil Produksi PKRT yang sesuai dengan Standart		2 Produk	2 Produk	2 Produk	2 Produk
194	Jumlah Produsen PKRT yang Berijin sesuai PERMENKES		1 Produsen	2 Produsen	2 Produsen	2 Produsen
195	Persentase Pemohon Produsen Industri Rumah Tangga Pangan yang diterbitkan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (%)	100%	100%	100%	100%	100%
196	Jumlah Pemohon Produsen Industri Rumah Tangga Pangan yang mengikuti Bimtek Penyuluhan Keamanan Pangan	153	200	260	260	260
197	Jumlah Pemohon Produsen Industri Rumah Tangga Pangan yang telah diperiksa sarana dan terbit sertifikat PIRT	153	200	260	260	260
198	Jumlah Kegiatan Pengkajian Sertifikasi Produksi	0	1	4	4	4
199	Presentase Sampel makanan Industri Rumah Tangga Pangan yang diuji laboratorium yang memenuhi syarat	0	62%	70%	70%	70%
200	jumlah pengawasan sarana Industri rumah tangga pangan	0	77	48	48	48
201	jumlah pengawasan produk pangan industri rumah tangga	0	62	60	60	60
202	Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri	19,4	19,6%	19,80%	20%	20%
203	Jumlah Poskestren Yang dilakukan pendampingan	10	10	10	10	10
204	Cakupan Taman Posyandu Optimal		10%	15%	18%	18%
205	Jumlah sasaran yang mengikuti KIE		360	300	300	300
206	Jumlah petugas kesehatan yang memberikan konseling		40	38	38	38
207	Persentase kegiatan promotif dan preventif yang dilaksanakan sesuai perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%
208	Presentase kegiatan BOK UKM Kabupaten Berjalan lancar	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian 2020	Target Capaian Setiap tahun			Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	
209	Presentase kegiatan promotif dan preventif yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%
210	Persentase Poskestren yang dilakukan pendampingan	100%	100%	100%	100%	100%
211	Jumlah Poskestren Yang dilakukan pendampingan	10	10	10	10	10
212	Cakupan Taman Posyandu Optimal		10%	15%	18%	18%
213	Persentase DAM yang Memenuhi Syarat			56%	60%	60%
214	Persentase TPM yang Memenuhi Syarat			37%	40%	40%
215	Prosentase Tempat Pengelolaan makanan jajanan dan sentra makanan jajanan yang mendapatkan stiker pembinaan			6%	10%	10%

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan yang dilakukan pada dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Periode 2018- 2023 pada dasarnya adalah untuk menyesuaikan pelaksanaan pembangunan daerah terhadap perubahan yang terjadi, yaitu wabah Covid-19 dan perubahan kebijakan nasional. Untuk dapat menyelaraskan pembangunan daerah Kabupaten Madiun dengan perubahan-perubahan yang terjadi tersebut maka dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Periode 2018-2023 harus dilakukan perubahan.

Perubahan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Periode 2018- 2023 mengharuskan dilakukannya perubahan Renstra tiap SKPD di Kabupaten Madiun. Perubahan yang dilakukan ini juga bertujuan untuk mengakselerasi pencapaian dari visi dan misi Bupati Madiun sehingga membawa dampak yang positif bagi masyarakat Kabupaten Madiun.

Perubahan Renstra pada Dinas Kesehatan Tahun 2021 - 2023 merupakan perubahan dokumen perencanaan pada Dinas Kesehatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perencanaan pada Dinas Kesehatan serta berpedoman pada Perubahan RPJMD perubahan Tahun 2021 - 2023. Perubahan Renstra pada Dinas Kesehatan Tahun 2021 - 2023 akan menjadi pedoman pada Dinas Kesehatan dalam menyusun Renja pada Dinas Kesehatan Tahun 2021, 2022, dan 2023.

LAMPIRAN

TC 23 & TC 24

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
Kabupaten Madiun

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani									91,22	91,15	93,37							
2	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan									93,00	91,49	92,32							
3	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)									89,91	81,07	85,44							
4	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan									100	100	100							
5	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA									73,38	89,29	77,24							
6	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD									100	100	100							
7	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin									100	2,64	87,59							
8	Cakupan kunjungan bayi									95,28	95,04	94,47							
	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk												0,63	0,64					
	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi												100	100					
	Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk Kota												1,80						
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil												91,99	96,59					
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan												93,61	91,35					
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir												98,38	96,82					
	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar												87,86	67,00					

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar												32,84	30,42					
	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar												40,43	66,65					
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar												54,03	37,72					
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar												14,04	10,04					
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar												47,81	31,66					
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar												102,93	97,23					
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar												73,04	34,56					
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar												71,89	75,14					
	Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	90	94,6										89,81						
	Presentase Balita Gizi Buruk/Stunting yg mendapatkan Perawatan/Pelayanan Kesehatan	83	76										100						
10	Persentase penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD												100						
11	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup												144,52						

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12	Cakupan kunjungan ibu hamil K-4	88	90							91,08									
	Cakupan komplikasi	80	74							91,22	91,15	93,37							
	Cakupan pertolongan	95	90							93	91,49	92,32							
	Cakupan pelayanan nifas	95	89							92,44									
	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	80	77							86,33									
	Cakupan kunjungan bayi	96	92							77	95,04	94,47							
	Cakupan desa/kelurahan Universal Child	90	94,6							89,81	81,07	85,44							
	Cakupan pelayanan anak balita	83	76							85,16									
	Cakupan pemberian ASI	100	78							100									
	Cakupan balita gizi buruk	100	100							100	100	100							
	Cakupan penjangkaran	100	100							100									
	Cakupan peserta KB aktif	70	84							86,18									
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita AFP																		
	- Penemuan penderita AFP	2	2							699									
	- Penemuan dan penanganan penderita	100	57							60,92									
	- Penemuan dan penanganan penderita	100	71							73,38	89,29	77,24							
	- Penemuan dan penanganan penderita	100	100							100	100	100							
	- Penanganan penderita	100	52							69,29									
	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	100							71,53	2,64	87,59							
	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	32,94							1,5	2,54	87,59							
	Cakupan pelayanan gawat darurat	100	100							100									
	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	100							100									
	Cakupan desa siaga aktif	100	100							100									
	Rasio daya tampung RS												0,63	0,64					
	Persentase RS Rujukan												100	100					
	Rasio Tenaga Kesehatan												1,80						
	Persentase ibu hamil												91,99	96,59					
	Persentase ibu bersalin												93,61	91,35					
	Persentase bayi baru lahir												98,38	96,82					

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Presentase pelayanan												87,86	67,00					
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar												32,84						
	Persentase orang usia 15-29												40,43						
	Persentase warga negara												54,03						
	Persentase penderita												14,05						
	Persentase penderita DM												47,81						
	Persentase ODGJ berat yang												102,93						
	Persentase orang terduga												73,04						
	Persentase orang dengan												71,89						
	Persentase Desa/kelurahan												88,35						
	Presentase Balita Gizi												100,00						
	Persentase penemuan dan												100,00						
	Angka Kematian Ibu Per												144,52						
	Rumah Tangga Bersanitasi												82,40						
	Posyandu												81,11						

Madiun, Desember 2021
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Madiun



dr. Soelistyo Widyanono
dr. SOELISTYO WIDYANTONO, MM

NIP. 196305131989111001

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggara a	Realisas i
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Dukungan Jaminan Persalinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Penyediaan/ Pemeliharaan Sarana	-	#####	-	-	-	-	1.337.084.245,00	-	-	-							
Distribusi Obat dan E-Logistik (DAK)	-	173.770.000,00	43.673.000,00	-	-	-	87.342.000,00	36.598.000,00	-	-							
Bantuan Operasional Kegiatan UKM	-	894.997.000,00	834.698.000,00	-	-	-	505.680.400,00	501.224.275,00	-	-							
Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Akreditasi Puskesmas	-	-	1.540.415.000,00	-	-	-	-	1.434.313.500,00	-	-							
Pengadaan Obat, Perbekalan Farmasi	147.158.295,00	-	-	-	-	147.109.380,00	-	-	-	-							
Peningkatan Derajat Kesehatan	621.301.321,00	-	-	-	-	478.715.000,00	-	-	-	-							
Peningkatan Pelayanan Kesehatan	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Peningkatan Puskesmas Menjadi	30.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Pengadaan Obat Perbekalan Farmasi	-	559.082.000,00	-	-	-	-	556.063.442,00	-	-	-							
Peningkatan Pelayanan Kesehatan	-	19.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-							
Peningkatan Puskesmas Menjadi	-	45.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-							
Penyediaan/ Pemeliharaan Sarana	#####	#####	-	-	-	1.394.647.989,00	993.924.300,00	-	-	-							
Sisa DAK Non Fisik	-	10.005.780,00	-	-	-	-	9.500.000,00	-	-	-							
Peningkatan Pelayanan Kesehatan	-	-	-	1.059.725.000,00	-	-	-	-	870.906.779,00	-							
Peningkatan dan Pengembangan	-	-	-	1.307.719.595,00	-	-	-	-	420.159.300,00	-							
Peningkatan Pelayanan Kesehatan	-	-	-	61.890.000,00	-	-	-	-	58.455.600,00	-							
Penyediaan Obat Gizi (DAK Penugasan)	-	-	-	568.608.000,00	-	-	-	-	227.384.200,00	-							
Pengkajian pengembangan lingkungan	-	-	-	2.765.225.000,00	-	-	-	-	2.681.378.246,00	-							
Penanggulangan Kurang Energi Protein	-	-	-	1.450.000,00	-	-	-	-	1.250.000,00	-							
Pendampingan Pos Kesehatan	-	-	-	121.029.000,00	-	-	-	-	103.037.500,00	-							
Peningkatan Pelayanan Kesehatan	-	-	-	183.609.400,00	-	-	-	-	168.948.641,00	-							
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal (Pajak)	-	-	-	462.344.400,00	-	-	-	-	255.861.400,00	-							
Pelayanan dan Intervensi Masalah	-	-	-	175.184.365,00	-	-	-	-	121.463.259,00	-							
Program Pengawasan Obat dan																	
Peningkatan pemberdayaan	95.511.000,00	87.070.000,00	61.430.000,00	-	-	93.511.000,00	86.960.000,00	61.370.000,00	-	-							
Peningkatan kapasitas laboratorium	83.314.000,00	48.310.000,00	30.980.000,00	-	-	83.312.000,00	43.345.000,00	26.828.000,00	-	-							
Peningkatan penyidikan dan	1.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-							
Peningkatan Pengawasan Peredaran	22.304.000,00	30.545.000,00	23.195.000,00	-	-	22.204.000,00	29.575.000,00	22.115.000,00	-	-							
Peningkatan Pelayanan Kesehatan	-	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	-	86.970.000,00	99.230.000,00	-	-							
Program Promosi Kesehatan dan																	
Pengembangan Pemberdayaan Pola	201.250.000,00	137.420.000,00	102.370.000,00	-	-	201.250.000,00	132.343.000,00	88.432.200,00	-	-							
Upaya Pelayanan Kesehatan Anak	107.710.000,00	69.128.000,00	356.620.000,00	-	-	107.710.000,00	67.543.000,00	330.961.350,00	-	-							
Peningkatan dan Pengembangan	-	-	1.784.994.000,00	-	-	-	-	808.820.000,00	-	-							
Pengembangan Taman Posyandu	260.000.000,00	125.000.000,00	55.000.000,00	-	-	260.000.000,00	122.143.000,00	54.984.800,00	-	-							
Program Perbaikan Gizi Masyarakat																	
Pemberian tambahan makanan dan	203.040.000,00	105.760.000,00	8.500.000,00	-	-	201.592.190,00	101.643.000,00	8.500.000,00	-	-							
Penanggulangan Kurang Energi Protein	251.921.600,00	156.174.000,00	156.174.000,00	-	-	251.687.880,00	149.262.570,00	154.872.950,00	-	-							
Pemberdayaan masyarakat untuk	231.402.800,00	84.992.400,00	116.400.000,00	-	-	227.807.450,00	54.927.400,00	110.354.400,00	-	-							
Pelayanan dan Intervensi Masalah	-	-	117.370.000,00	-	-	-	-	-	-	-							
Program Pengembangan Lingkungan																	
Pengembangan Lingkungan Sehat	865.010.000,00	728.220.000,00	84.084.500,00	-	-	826.893.500,00	696.837.000,00	73.567.000,00	-	-							
Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahrag	-	37.470.000,00	40.000.000,00	-	-	-	37.065.000,00	38.974.500,00	-	-							
Peningkatan Pelayanan Kesehatan	-	-	803.756.000,00	-	-	-	-	308.030.000,00	-	-							
Peningkatan Pelayanan Kesehatan	-	-	61.890.000,00	-	-	-	-	-	-	-							
Peningkatan Pelayanan Kesehatan	-	-	640.000.000,00	-	-	-	-	635.613.000,00	-	-							
Program Pencegahan dan																	
Penanggulangan Penyakit Menular																	
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	535.786.900,00	346.510.000,00	347.060.000,00	-	-	534.744.200,00	344.589.050,00	333.940.354,00	-	-							
Pelayanan pencegahan dan	241.487.500,00	262.285.000,00	392.906.950,00	-	-	238.035.700,00	259.893.750,00	373.256.100,00	-	-							
Peningkatan imunisasi	153.572.500,00	67.300.500,00	112.463.600,00	-	-	151.188.075,00	63.630.500,00	111.553.400,00	-	-							
Peningkatan Surveillance Epidemiologi	36.557.500,00	15.340.000,00	21.830.000,00	-	-	36.428.205,00	14.845.000,00	21.725.000,00	-	-							
Pencegahan dan Pengendalian	-	305.250.000,00	311.243.300,00	-	-	-	266.846.950,00	298.629.260,00	-	-							
Pencegahan dan Pengendalian	-	-	238.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-							
Upaya Promotif dan Preventif untuk	-	-	791.165.000,00	-	-	-	-	-	-	-							
Pengadaan Peralatan Pendukung Imunis	-	-	365.436.000,00	-	-	-	-	364.600.160,00	-	-							
Program Standarisasi Pelayanan																	
Registrasi, Akreditasi, Sertifikasi	1.080.000,00	59.120.000,00	146.945.700,00	-	-	838.000,00	59.070.000,00	142.369.500,00	-	-							

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi	-	194.775.303,00				-	193.121.455,00										
Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi	-	1.497.164,00				-	850.000,00										
Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi			34.104.963,00					32.676.600,00									
Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi			473.200,00					-									
Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi			42.779.865,00					19.024.380,00									
Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi			9.000.496,00					9.000.000,00									
Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi			31.007.159,00					30.306.250,00									
Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi			26.738.121,00					13.345.000,00									
Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi				43.217.534,00					0,00								
Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi				27.364.582,00					0,00								
Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi				65.953.009,00					0,00								
Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi				19.934.644,00					0,00								
Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi				28.245.062,00					0,00								
Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi				38.170,00					0,00								

Madiun, Desember 2021
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Madiun



Dr. SOELISTYO WIDYANTONO, MM
NIP. 196305131989111001